



# RENSTRA 2024-2026

**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**



**Jalan Majapahit No. 09 Mataram Telp. 631585,  
Fax. (0370) 622502 (Pusat) M A T A R A M  
KODE POS : 83125 (Pusat) 83236 (Depo)**

## KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024-2026 mengakomodir kebutuhan sesuai dinamika lingkungan strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat serta proyeksi hingga tahun 2024, dalam kerangka mendukung reformasi birokrasi.

Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024-2026 difokuskan pada target kinerja masing-masing pemangku kepentingan berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai struktur organisasi dengan menjaga komitmen terhadap target kinerja prioritas daerah dalam RPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024-2026.

Dalam pelaksanaan renstra dimaksud diisyaratkan komitmen dan kinerja yang semakin baik serta integritas seluruh jajaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk menjawab tugas dan tanggung jawab birokrasi pemerintahan serta harapan publik yang semakin besar dimasa mendatang. Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024-2026, diharapkan dapat menjadi panduan operasional dalam melaksanakan tugas secara berkelanjutan dan sistematis. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya dalam menjalankan pengabdian kepada Nusa Tenggara Barat.

Mataram, Januari 2024

Plt. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan  
Provinsi Nusa Tenggara Barat,



**H. Amir, S.Pd., MM.**  
NIP. 19720802 199303 1 013

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR STRUKTUR ORGANISASI .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	4
1.3 Maksud dan Tujuan .....	6
1.4 Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II      GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN                 PROVINSI NTB</b>	
2.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah .....	9
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah .....	17
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	18
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah .....	25
<b>BAB III      PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERPUSTAKAAN DAN                 KEARSIPAN PROVINSI NTB</b>	
3.1 Identifikasi Permasalahan .....	27
3.2 Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota .....	28
3.3 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS RPJMD .....	31
3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis .....	32
<b>BAB IV      TUJUAN DAN SASARAN</b>	
4.1 Tujuan dan Sasaran .....	34
4.2 <i>Cascading</i> Kinerja Perangkat Daerah .....	36
<b>BAB V      STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>38</b>
<b>BAB VI      RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b>	
6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat 2024-2026 .....	41
6.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Program Unggulan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021-2023 .....	58

<b>BAB VII</b>	<b>KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>	<b>62</b>
<b>BAB VIII</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>64</b>

## **DAFTAR STRUKTUR ORGANISASI**

Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB .....	12
---	----

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 2.2.1</b>	<b>Data Sumber Daya Aparatur .....</b>	<b>17</b>
<b>Tabel 2.2.2</b>	<b>Data Sumber Daya Aparatur Menurut Golongan .....</b>	<b>17</b>
<b>Tabel 2.2.3</b>	<b>Aset yang Dikelola .....</b>	<b>18</b>
<b>Tabel 2.3.1</b>	<b>Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021-2023 .....</b>	<b>23</b>
<b>Tabel 2.3.2</b>	<b>Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021-2023 .....</b>	<b>24</b>
<b>Tabel 4.1.1</b>	<b>Tujuan dan Sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB Tahun 2024-2026 .....</b>	<b>35</b>
<b>Tabel 4.2.1</b>	<b><i>Cascading</i> Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB Tahun 2024-2026 .....</b>	<b>37</b>
<b>Tabel 5.1.1</b>	<b>Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan .....</b>	<b>39</b>
<b>Tabel 6.1.1</b>	<b>Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024-2026 .....</b>	<b>41</b>
<b>Tabel 6.2.1</b>	<b>Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Utama Pendukung Program Unggulan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024-2026 .....</b>	<b>60</b>
<b>Tabel 7.1.1</b>	<b>Indikator Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB Tahun 2024-2026 .....</b>	<b>63</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renstra .....	3
--	---



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Upaya membangun kualitas manusia budaya literasi perlu dijadikan sebagai fondasi yang kokoh bagi terwujudnya masyarakat berkualitas dan sejahtera. Literasi adalah bentuk *cognitive skill* memungkinkan manusia untuk mengidentifikasi, mengerti, memahami, dan mencipta yang diperoleh dari kegiatan membaca yang kemudian ditransformasikan dalam kegiatan-kegiatan yang produktif yang memberikan manfaat sosial, ekonomi dan kesejahteraan.

Selanjutnya Arsip sebagai rekaman kegiatan atau peristiwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara mengandung informasi yang sejatinya merupakan memori kolektif dan jati diri bangsa. Dalam hal ini bidang kearsipan dapat berperan secara nyata dalam memperkuat ketahanan budaya melalui penyelamatan, pelestarian, dan pemanfaatan arsip guna mendukung pembangunan karakter bangsa. Pemanfaatan arsip dalam rangka pembangunan karakter akan melibatkan semua komponen bangsa dalam berbagai bentuk program publik dan media sehingga dapat diakses secara murah, mudah, dan langsung oleh masyarakat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Berdasarkan hal tersebut Perangkat daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan lima tahunan Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan memperhatikan tugas pokok dan fungsi.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pasal 264 ayat 5) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tatacara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD (Pasal 342).

Renstra Dinas Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024-2026 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka

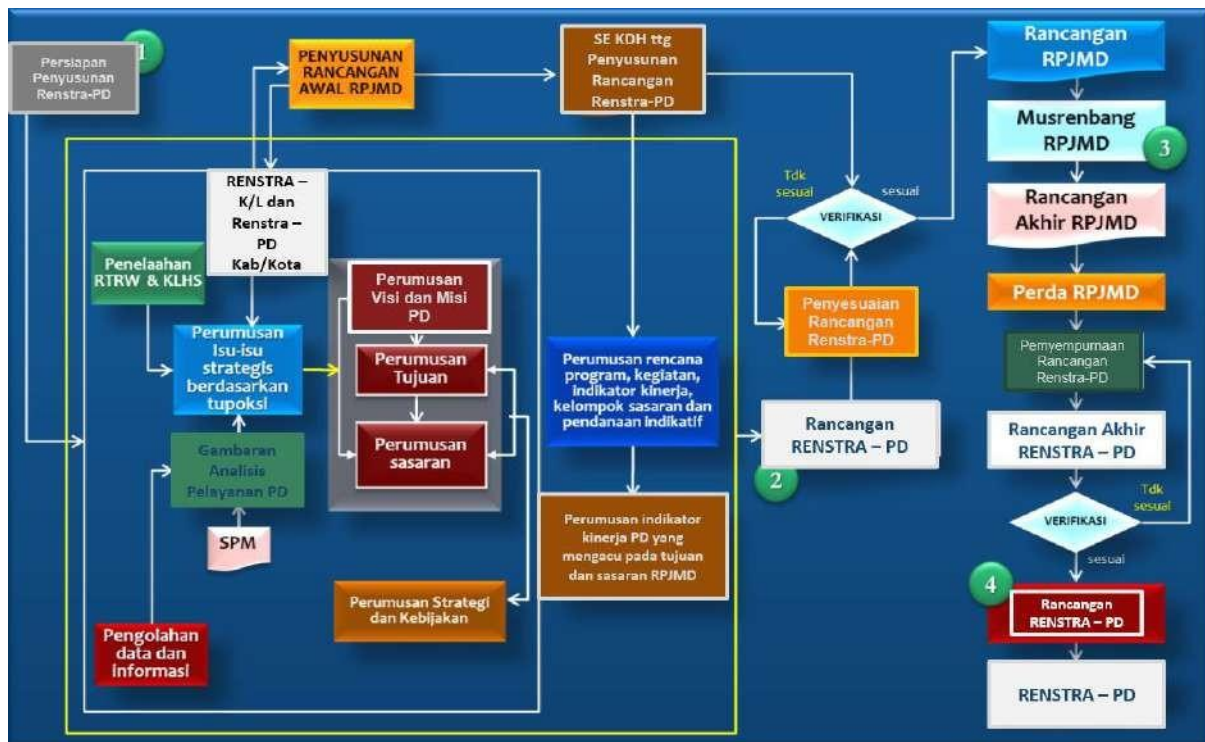


pelaksanaan urusan fungsi penunjang dalam bidang perencanaan pembangunan literasi masyarakat. Dalam penyusunan Renstra Dinas Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024-2026 mengacu kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.

Dokumen Renstra Dinas Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan formal disusun melalui proses partisipatif, teknokratis dan politis yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Proses penyusunan Renstra meliputi: (1) persiapan penyusunan (2) penyusunan Rancangan Awal (3) penyusunan Rancangan (4) penyusunan Rancangan Akhir dan (5) penetapan Renstra Perangkat Daerah

Proses penyusunan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024-2026 dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Renstra, Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra, dan telah dimulai sejak dimulainya penyusunan Rancangan Awal RPD. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Dinas Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024-2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagaimana Gambar 1.1.

**Gambar 1.1 Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB**



## **1.2 Landasan Hukum**

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104); Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 4438);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan menyebutkan bahwa Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka;
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan. Arsip sebagai identitas dan jati diri bangsa, serta sebagai memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus dikelola dan diselamatkan oleh Negara;
6. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6291);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3457);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1998 tentang Tata Cara Pengalihan Arsip ke Mikrofilm;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 4373);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
13. PP Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
14. PP Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
17. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta

- Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  24. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 10 Tahun 2016, tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Perpustakaan Daerah;
  25. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 30 Tahun 2016, tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan;
  26. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5);
  27. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025;
  28. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023;
  29. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat; dan
  30. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 15 Februari 2023.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini dimaksudkan untuk mendukung Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru. Maksud penyusunan Renstra sebagai berikut:

1. Sebagai rumusan untuk menentukan sasaran dan arah kebijakan program unggulan dalam skala prioritas;
2. Untuk mengukur tingkat keberhasilan dan pencapaian setiap kurun waktu yang telah ditempuh dalam pelaksanaan kegiatan; dan
3. Sebagai acuan dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB.

Tujuan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah:

1. Sebagai pedoman untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) setiap tahun;
2. Sebagai dasar pelaksanaan pembangunan daerah khususnya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB;
3. Sebagai acuan dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB;
4. Untuk mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi kepada masa depan, serta peningkatan mutu berbagai produk perencanaan secara optimal; dan
5. Untuk mencapai sasaran yang meliputi kebijaksanaan program dan kegiatan dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB Tahun 2024-2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017, tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tatacara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah:

- BAB I PENDAHULUAN: Menyajikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.
- BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH: Menyajikan tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat daerah, sumberdaya perangkat daerah, kinerja

pelayanan perangkat daerah, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.

- BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH: Menyajikan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah dan penentuan isu-isu strategis.
- BAB IV TUJUAN DAN SASARAN: Menyajikan tujuan dan sasaran Renstra perangkat daerah Tahun 2024-2026, *Cascading* kinerja Perangkat Daerah.
- BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN: Menyajikan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah Tahun 2024-2026.
- BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN: Menyajikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja kelompok sasaran dan pagu.
- BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN: Memuat penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.
- BAB VIII PENUTUP



## **BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB**

#### **2.1.1 Tugas Pokok**

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai lembaga teknis daerah yang merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan yang bersifat spesifik yaitu urusan perpustakaan dan kearsipan. Berikut Tugas Pokok Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB:

- a. Merumuskan bahan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan, Deposit, Pengolahan Dan Pelestarian Bahan Perpustakaan, Pengelolaan, Pembinaan, Dan Pengawasan Kearsipan, Perlindungan, Penyelamatan Dan Pelayanan Kearsipan, Pelayanan Perpustakaan Dan Kearsipan serta Kesekretariatan;
- b. Merumuskan bahan norma, standard pedoman dan kriteria (NSPK) perpustakaan dan kearsipan;
- c. Merumuskan bahan kebijakan pembudayaan gemar membaca;
- d. Merumuskan bahan dan menetapkan kebijakan pengelolaan perpustakaan dan kearsipan;
- e. Merumuskan bahan kebijakan pengumpulan dan pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam (KCKR) serta naskah kuno milik daerah;
- f. Merumuskan bahan kebijakan untuk penerbitan Katalog Induk Daerah (KID);
- g. Merumuskan bahan kebijakan pengumpulan dan pelestarian naskah kuno milik daerah;
- h. Merumuskan bahan kebijakan pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh pemerintah daerah provinsi;

- i. Merumuskan bahan kebijakan teknis pengembangan jabatan fungsional pustakawan dan fungsional arsiparis di skala provinsi sesuai kebijakan nasional;
- j. Merumuskan bahan kebijakan teknis penilaian dan penetapan angka kredit Jabatan Fungsional Tertentu pustakawan dan arsiparis;
- k. Merumuskan bahan pelaksanaan layanan jasa koleksi bahan rujukan, naskah, multimedia dan jaringan otomasi perpustakaan dan kearsipan;
- l. Merumuskan bahan dan menyelenggarakan pembinaan, pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis;
- m. Merumuskan bahan dan menyelenggarakan preservasi, perlindungan dan penyelamatan arsip serta melakukan autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan Provinsi, dan membuat daftar arsip;
- n. Merumuskan bahan dan menyelenggarakan kerjasama dan informasi ilmiah perpustakaan dan kearsipan;
- o. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan bahan/materi RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPATAPKIN, LKjIP/LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Dinas kegiatan Dinas;
- p. Merumuskan bahan dan melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi;
- q. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; dan
- r. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.

Adapun ringkasan tugas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB adalah merumuskan bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan pemerintahan umum dibidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan, Deposit dan Informasi Perpustakaan, Pengelolaan Arsip Dinamis, Pengelolaan Arsip Statis, Pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan serta Kesekretariatan.

Untuk melaksanakan tugasnya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan strategis dibidang Perpustakaan dan Kearsipan;
- b. Pelaksanaan kebijakan strategis dibidang Perpustakaan dan Kearsipan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Perpustakaan dan Kearsipan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Perpustakaan dan Kearsipan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB, dibantu oleh :

1. Sekretariat, Menyusun bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan pemerintahan dibidang Program, Keuangan dan Umum, terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Umum.  
Menyiapkan bahan/materi kebijakan, rencana/program dan melaksanakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan pemerintahan dibidang Umum.
- b. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan, berikut tugas dan fungsi:
  - a. Tugas  
Menyusun bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan pemerintahan dibidang Pembinaan Perpustakaan, Pengembangan Minat Baca dan Promosi Perpustakaan, Kelembagaan dan Kerjasama.
  - b. Fungsi
    - Penyusunan kebijakan strategis dibidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan;
    - Pelaksanaan kebijakan strategis dibidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan;

- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan;
  - Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan; dan
  - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas.
- c. Bidang Deposit, Pengolahan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan, berikut tugas dan fungsi:
- a. Tugas
- Menyusun bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan pemerintahan dibidang Deposit Perpustakaan, Pelestarian dan Alih Media Perpustakaan dan Pengembangan dan Pengolahan Bahan Perpustakaan.
- b. Fungsi
- Penyusunan kebijakan strategis dibidang Deposit, Pengolahan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan;
  - Pelaksanaan kebijakan strategis dibidang Deposit, Pengolahan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan;
  - Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Deposit, Pengolahan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan;
  - Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Deposit, Pengolahan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan; dan
  - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas.
- d. Bidang Pengelolaan, Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan, berikut tugas dan fungsi:
- a. Tugas
- Menyusun bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan pemerintahan dibidang Pembinaan Kearsipan, Pengelolaan Arsip Dinamis, Akuisisi dan Penyusutan.

b. Fungsi

- Penyusunan kebijakan strategis dibidang Pengelolaan, Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan;
- Pelaksanaan kebijakan strategis dibidang Pengelolaan, Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Pengelolaan, Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan;
- Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Pengelolaan, Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas.

e. Bidang Perlindungan, Penyelamatan dan Pelayanan Kearsipan, berikut tugas dan fungsi:

a. Tugas

Menyusun bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan pemerintahan dibidang Penyelamatan dan Pengolahan Arsip Statis, Penyimpanan dan Pelestarian Arsip, Penyediaan dan Autentifikasi Kearsipan.

b. Fungsi

- Penyusunan kebijakan strategis dibidang Perlindungan dan Penyelamatan Kearsipan;
- Pelaksanaan kebijakan strategis dibidang Perlindungan dan Penyelamatan Kearsipan;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Perlindungan dan Penyelamatan Kearsipan;
- Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Perlindungan dan Penyelamatan Kearsipan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas.

f. Bidang Pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan, berikut tugas dan fungsi:

a. Tugas

Menyusun bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan pemerintahan dibidang Otomatisasi Perpustakaan dan Kearsipan, Pelayanan Perpustakaan dan Pelayanan Kearsipan.

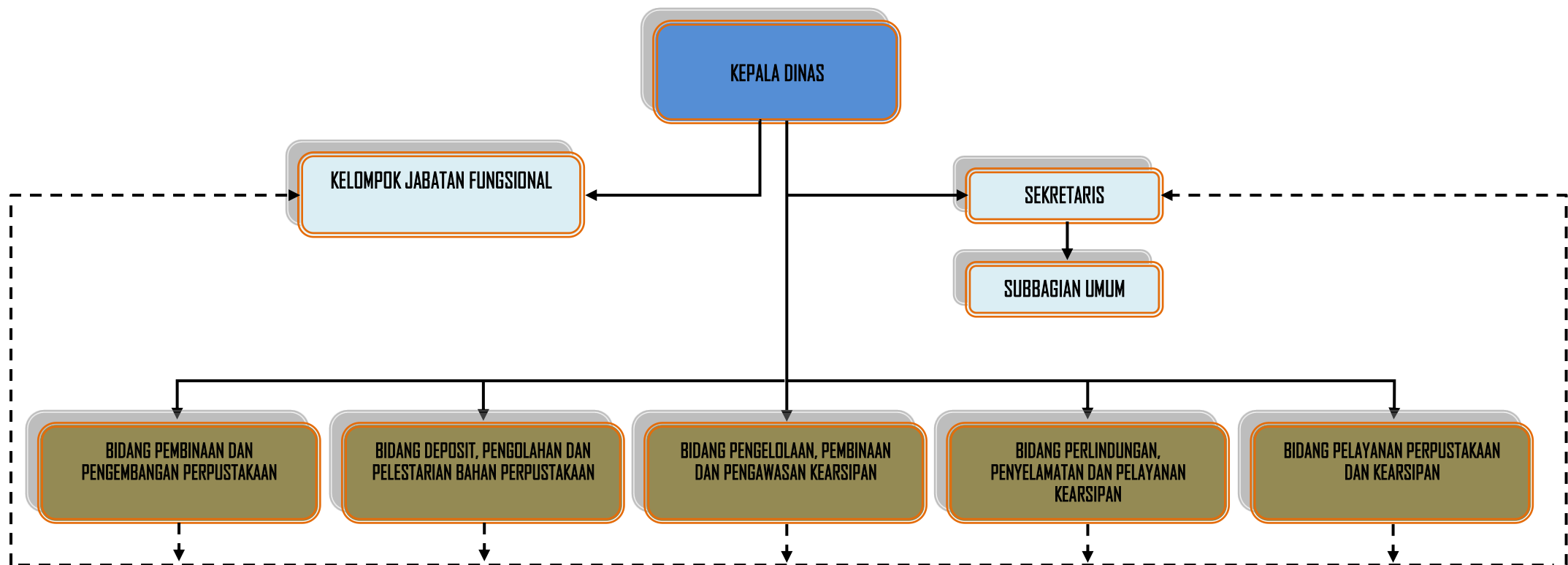
b. Fungsi

- Penyusunan kebijakan strategis dibidang Pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan;
- Pelaksanaan kebijakan strategis dibidang Pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan;
- Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas.

g. Kelompok Jabatan Fungsional

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat dilihat pada gambar 2.1.1, sebagai berikut:

**Gambar 2.1.1 Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB**  
**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 8 Tahun 2023, tanggal 15 Februari 2023.**





## 2.2 Sumber Daya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

### 2.2.1 Sumber Daya Aparatur

Sumber daya aparatur adalah penggerak utama roda pemerintahan. Jumlah personil Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat sampai dengan Desember 2023, adalah sebanyak 87 orang, dengan komposisi sebagai berikut:

- a. Sumber Daya Aparatur (SDA) ditinjau dari status kepegawaian

**Tabel 2.2.1 Data Sumber Daya Aparatur (SDA)**

No.	Status Kepegawaian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah (Orang)
1.	ASN	45	41	86
2.	PTT	0	1	1
<b>TOTAL</b>		<b>45</b>	<b>42</b>	<b>87</b>

- b. Sumber Daya Aparatur Menurut Golongan Kepangkatan

**Tabel 2.2.2 Data Sumber Daya Aparatur Menurut Golongan**

No.	Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah (Orang)
1.	IV E	0	0	0
2.	IV D	0	0	0
3.	IV C	3	0	3
4.	IV B	5	7	12
5.	IV A	2	4	6
6.	III D	7	10	17
7.	III C	3	3	6
8.	III B	5	8	13
9.	III A	3	4	7
10.	II D	11	4	15
11.	II C	1	1	2
12.	II B	2	0	2
13.	II A	0	0	0
14.	I D	3	0	3
15.	I C	0	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>45</b>	<b>41</b>	<b>86</b>

c. Aset yang Dikelola Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB

**2.2.3 Tabel Aset yang Dikelola Desember 2023**

No.	Jenis Asset	Jumlah	Harga
1	Tanah Bangunan dan Gedung Kantor	1.500 m <sup>2</sup>	332.750.000
2	Tanah Bangunan dan Gedung Kantor	5.000 m <sup>2</sup>	300.600.000
3	Tanah Bangunan dan Gedung Kantor	155 m <sup>2</sup>	4.339.500
4	Tanah Bangunan dan Gedung Kantor	2.650 m <sup>2</sup>	1.722.500.000
5	Tanah Bangunan dan Gedung Kantor	1.258 m <sup>2</sup>	50.240.000
6	Tanah Bangunan dan Gedung Kantor	1.000 m <sup>2</sup>	40.000.000
7	Tanah Bangunan dan Gedung Kantor	388 m <sup>2</sup>	15.520.000
8	Tanah Bangunan Rumah Dinas	388 m <sup>2</sup>	15.520.000
9	Kendaraan Roda 4	17 buah	2.726.564.196
10	Kendaraan Roda 2	31 buah	330.112.501
11	Sepeda Listrik	4 buah	84.000.000

**2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB**

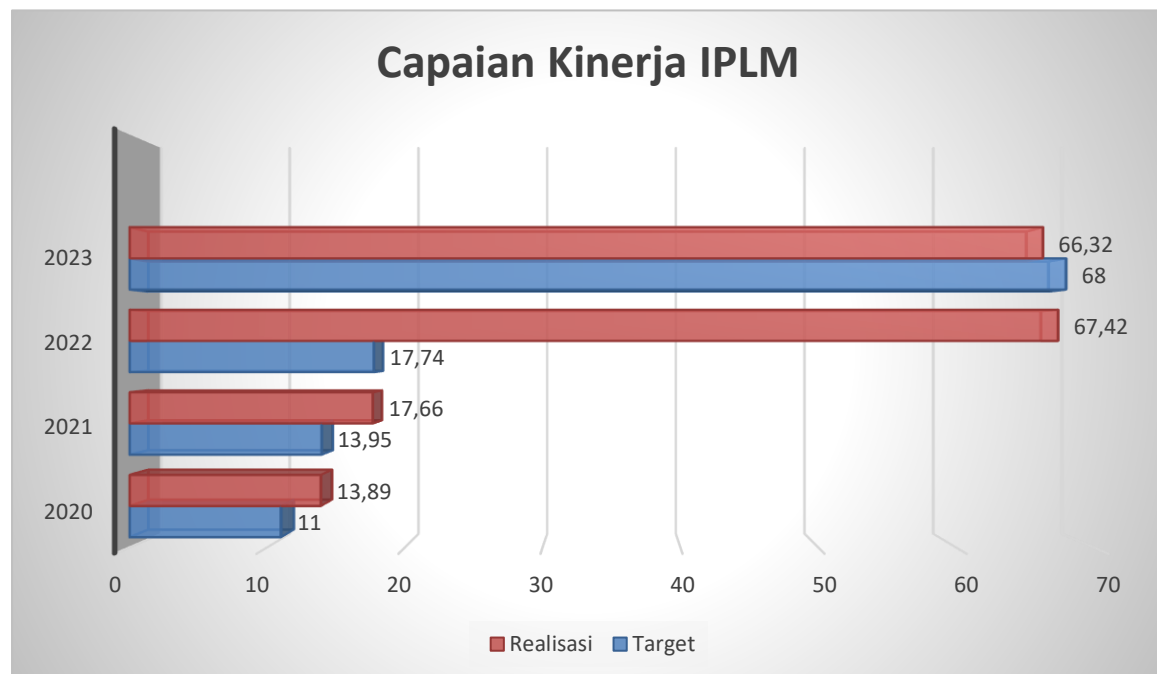
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat adalah pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat dalam mencapai budaya literasi masyarakat dengan pengukuran pada Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat dan Aspek Masyarakat.

Sebagai wujud kinerja dan kerjasama antara pusat dan daerah di bidang Perpustakaan, maka Perpustakaan Nasional Republik Indonesia bersama Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB sebagai Pembina untuk provinsi NTB melakukan pengukuran kinerja daerah terkait perkembangan literasi di daerah, melalui sebuah instrument pengukuran terhadap usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah (tingkat provinsi dan kab./kota) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat guna mencapai budaya literasi masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, Perpustakaan Nasional RI telah merilis Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) untuk wilayah Provinsi NTB. Pada tahun 2020, berdasarkan data Perpustakaan Nasional RI dalam mengukur Indeks Pembangunan Literasi

Masyarakat (IPLM) pada 34 provinsi di Indonesia, posisi Provinsi Nusa Tenggara Barat berada pada urutan 14 dengan indeks 13,89. Sementara hasil IPLM 2021, urutan Provinsi Nusa Tenggara Barat pada urutan ke 10 dengan indeks 17,66. Selanjutnya di Tahun 2022 hasil IPLM dengan indeks 67,42. Berikutnya hasil IPLM Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 sebesar 66,32.

**Tabel 2.3.1 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)  
Provinsi Nusa Tenggara Barat**

Hasil IPLM per Kab/Kota provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020-2023 seperti yang tersaji sebagai berikut.



## 1. Indeks IPLM Tahun 2020 Provinsi Nusa Tenggara Barat

Indeks IPLM 2020 Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) adalah sebesar 13,89.

**Tabel 2.3.2 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat  
Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2020**

<b>INDEKS PEMBANGUNAN LITERASI MASYARAKAT</b>		<b>: 13,89</b>
1.	Pemerataan Layanan Perpustakaan (UPLM1)	: 0,0011
2.	Ketercukupan Koleksi (UPLM2)	: 0,0916
3.	Ketercukupan Tenaga Perpustakaan (UPLM3)	: 0,0001
4.	Tingkat Kunjungan Masyarakat/ Hari (UPLM4)	: 0,0004
5.	Perpustakaan Ber-SNP (UPLM5)	: 0,0006
6.	Keterlibatan Masyarakat di Kegiatan Sosialisasi (UPLM6)	: 0,0042
7.	Anggota Perpustakaan (UPLM7)	: 0,0410



Jumlah Penduduk (2019):  
**5.070.385**

Jumlah Penduduk Usia Sekolah 2019 (5-19 Tahun):  
**1.432.090**

Jumlah Penduduk Usia Pendidikan Tinggi 2019 (20-24 Tahun):  
**430.484**

NO.	INDIKATOR INDEKS PEMBANGUNAN LITERASI MASYARAKAT	NILAI	INTERPRETASI
1.	Rasio Ketersediaan Perpustakaan		
	a. Rasio ketersediaan perpustakaan umum	0,00025	Terdapat 25 perpustakaan per 100.000 penduduk
	b. Rasio ketersediaan perpustakaan sekolah	0,00281	Terdapat 281 perpustakaan per 100.000 penduduk usia sekolah
	c. Rasio ketersediaan perpustakaan Perguruan Tinggi	0,00011	Terdapat 11 perpustakaan per 100.000 penduduk usia pendidikan tinggi
2.	Persentase Perpustakaan Dipersepsi ber-SNP	57%	Terdapat 57% perpustakaan yang dipersepsi memenuhi standar nasional perpustakaan
3.	Persentase Jumlah Koleksi Buku yang Dipinjam Terhadap Jumlah Koleksi	52,8%	Terdapat 52,8% buku yang dipinjam dari total jumlah koleksi
4.	Rasio Ketercukupan Koleksi Berdasarkan IFLA/UNESCO	0,0458	<b>Belum Memenuhi</b>
5.	Kekurangan Jumlah Koleksi Berdasarkan IFLA/UNESCO	9.676.206	Kekurangan koleksi di PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT sebanyak 9.676.206
6.	Tingkat Ketercukupan Tenaga Perpustakaan		
	a. Rasio Ketercukupan Tenaga Perpustakaan	13.630	1 tenaga perpustakaan melayani 13.630 penduduk; Tidak Mencukupi
	b. Rasio Ketercukupan Pustakawan Memiliki SK Fungsional/Kualifikasi Ilmu Perpustakaan	55.719	1 pustakawan, melayani 55.719 penduduk; Belum Mencukupi
	c. Persentase Pustakawan Memiliki SK Fungsional	17,5%	Terdapat 17,5% tenaga perpustakaan yang merupakan Pustakawan dengan SK Fungsional

d. Persentase Pustakawan Sesuai Kualifikasi	7,0%	Terdapat 7% tenaga perpustakaan yang merupakan Pustakawan dengan SK Fungsional
e. Persentase Tenaga Teknis	75,5%	Terdapat 75,5% tenaga perpustakaan yang merupakan tenaga teknis
7. Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan	0,04%	Persentase jumlah kunjungan per hari dibagi jumlah penduduk sebanyak 0,04%: Belum Ideal
8. Tingkat Keaktifan Kegiatan Sosialisasi & Pemanfaatan Perpustakaan	5,1%	Keaktifan dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan KIE & pemanfaatan perpustakaan sebanyak 5,1%
9. Tingkat Engagement Anggota Perpustakaan	4,1%	Terdapat 4,1% penduduk yang merupakan anggota perpustakaan
10. Rata-rata Anggaran Pengembangan Perpustakaan per Jumlah Penduduk	Rp 3.935	Terdapat anggaran pengembangan perpustakaan sebesar Rp 3.935 per jumlah penduduk

## 2. Indeks IPLM Tahun 2021 Provinsi Nusa Tenggara Barat

Indeks IPLM 2021 Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) adalah sebesar 17,66.

**Tabel 2.3.3 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat  
Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2021**

<b>INDEKS PEMBANGUNAN LITERASI MASYARAKAT : 17,66</b>	
1. Pemerataan Layanan Perpustakaan (UPLM1)	: 0,00084
2. Ketercukupan Koleksi (UPLM2)	: 0,10667
3. Ketercukupan Tenaga Perpustakaan (UPLM3)	: 0,00008
4. Tingkat Kunjungan Masyarakat/ Hari (UPLM4)	: 0,00022
5. Perpustakaan Ber-SNP (UPLM5)	: 0,00069
6. Keterlibatan Masyarakat di Kegiatan Sosialisasi (UPLM6)	: 0,00824
7. Anggota Perpustakaan (UPLM7)	: 0,05986



**Jumlah Penduduk (2020):  
5.320.092**

Jumlah Penduduk Usia  
Sekolah 2020 (5-19 Tahun):  
**1.405.029**

Jumlah Penduduk  
Usia Pendidikan Tinggi 2020 (20-24  
Tahun):  
**448.401**

NO.	INDIKATOR INDEKS PEMBANGUNAN LITERASI MASYARAKAT	NILAI	INTERPRETASI
1.	Rasio Ketersediaan Perpustakaan		
	a. Rasio Ketersediaan Perpustakaan Umum	0,00024	Terdapat 24 perpustakaan per 100.000 penduduk
	b. Rasio Ketersediaan Perpustakaan Sekolah	0,00217	Terdapat 217 perpustakaan per 100.000 penduduk usia sekolah
	c. Rasio Ketersediaan Perpustakaan Perguruan Tinggi	0,00020	Terdapat 20 perpustakaan per 100.000 penduduk usia pendidikan tinggi
2.	Persentase Perpustakaan Dipersepsi ber-SNP	82,5%	Terdapat 82,5% perpustakaan yang

			dipersepsi memenuhi standar nasional perpustakaan
3.	Persentase Jumlah Koleksi Buku yang Dipinjam Terhadap Jumlah Koleksi	14,9%	Terdapat 14,9% buku yang dipinjam dari total jumlah koleksi
4.	Rasio Ketercukupan Koleksi Berdasarkan IFLA/UNESCO	0,0533	<b>Belum Memenuhi</b>
5.	Kekurangan Jumlah Koleksi Berdasarkan IFLA/UNESCO	10.072.699	Kekurangan koleksi di PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT sebanyak 10.072.699
6.	Tingkat Ketercukupan Tenaga Perpustakaan		
a.	Rasio Ketercukupan Tenaga Perpustakaan	12.488	1 tenaga perpustakaan melayani 12.488 penduduk; Tidak Mencukupi
b.	Rasio Ketercukupan Pustakawan Memiliki SK Fungsional/Kualifikasi Ilmu Perpustakaan	120.911	1 pustakawan, melayani 120.911 penduduk; Belum Mencukupi
c.	Persentase Pustakawan Memiliki SK Fungsional	5,2%	Terdapat 5,2% tenaga perpustakaan yang merupakan Pustakawan dengan SK Fungsional
d.	Persentase Pustakawan Sesuai Kualifikasi	5,2%	Terdapat 5,2% tenaga perpustakaan yang merupakan Pustakawan dengan SK Fungsional
e.	Persentase Tenaga Teknis Memiliki Sertifikasi	23,5%	Terdapat 23,5% tenaga perpustakaan yang merupakan tenaga teknis yang memiliki sertifikasi keperpustakaan
f.	Persentase Tenaga Teknis Tanpa Sertifikasi	66,2%	Terdapat 66,2% tenaga perpustakaan yang merupakan tenaga teknis tanpa sertifikasi keperpustakaan
7.	Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan	0,0%	Persentase jumlah kunjungan per hari dibagi jumlah penduduk sebanyak 0,02%: Belum Ideal
8.	Tingkat Keaktifan Kegiatan Sosialisasi & Pemanfaatan Perpustakaan	0,8%	Keaktifan dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan KIE & pemanfaatan perpustakaan sebanyak 0,8%
9.	Tingkat Engagement Anggota Perpustakaan	6,0%	Terdapat 6% penduduk yang merupakan anggota perpustakaan
10.	Rata-rata Anggaran Pengembangan Perpustakaan per Jumlah Penduduk	Rp. 4.139	Terdapat anggaran pengembangan perpustakaan sebesar Rp. 4.139 per jumlah penduduk

### 3. Indeks IPLM Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Barat

Indeks IPLM 2022 Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) adalah sebesar 67,42

**Tabel 2.3.4 Rekapitulasi UPLM per Kab/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2022**

Kode	Kab./Kota	UPLM1	UPLM2	UPLM3	UPLM4	UPLM5	UPLM6	UPLM7	IPLM
52.01	Lombok Barat	0,0037	1,7311	0,0041	0,4299	1,6904	0,2711	0,4846	65,93
52.02	Lombok Tengah	0,0021	1,3985	0,0044	0,3514	1,7491	0,2385	0,5483	61,32
52.03	Lombok Timur	0,0024	1,8504	0,0010	0,4335	1,4942	0,2947	0,6661	67,75
52.04	Sumbawa	0,0025	1,5890	0,0053	0,3911	1,5871	0,3098	0,7048	65,57
52.05	Dompu	0,0020	1,1426	0,0030	0,3921	1,0880	0,2995	0,3889	47,37
52.06	Bima	0,0025	1,6265	0,0037	0,4061	1,5474	0,2856	0,6730	64,93
52.07	Sumbawa Barat	0,0036	2,3592	0,0048	0,4500	1,4428	0,3132	0,7678	76,30
52.08	Lombok Utara	0,0035	1,8632	0,0065	0,4366	1,2502	0,3823	1,1767	73,13
52.71	Kota Mataram	0,0025	2,3507	0,0010	0,4649	2,0322	0,3823	1,1695	91,47
52.72	Kota Bima	0,0025	1,2782	0,0085	0,4333	1,4467	0,3111	0,7494	60,42
	<b>Nusa Tenggara Barat</b>	<b>0,0027</b>	<b>1,7189</b>	<b>0,0042</b>	<b>0,4189</b>	<b>1,5328</b>	<b>0,3088</b>	<b>0,7329</b>	<b>67,42</b>

Pencapaian nilai IPLM Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 67,42 dan masuk ke dalam kategori Sedang. Nilai IPLM tertinggi dicapai Kota Mataram dengan nilai 91,47, sedangkan nilai terendah oleh Kab. Dompu dengan nilai 47,37.

**Tabel 2.3.5 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat  
Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2022**

<b>INDEKS PEMBANGUNAN LITERASI MASYARAKAT : 67,42</b>	
1. Pemerataan Layanan Perpustakaan (UPLM1)	: 0,0027
2. Pemerataan Koleksi Perpustakaan (IPLM2)	: 1,7189
3. Pemerataan Tenaga Perpustakaan (UPLM3)	: 0,0042
4. Tingkat Kunjungan Pemustaka (UPLM4)	: 0,4189
5. Perpustakaan Ber-SNP (UPLM5)	: 1,5328
6. Keterlibatan Masyarakat Dalam Sosialisasi Perpustakaan (UPLM6)	: 0,3088
7. Jumlah Pemustaka (UPLM7)	: 0,7329



**Jumlah Penduduk**  
(BPS 2020)  
**5.125.622**

**Jumlah Penduduk Usia Sekolah**  
(Kemendikbud dan BPS 2022)  
**1.023.228**

**Jumlah Penduduk Usia Perguruan Tinggi**  
(BPS 2022)  
**138.957**

NO.	INDIKATOR INDEKS PEMBANGUNAN	NILAI	INTERPRETASI
1.	Rasio Ketersediaan Perpustakaan		
a.	Rasio ketersediaan perpustakaan umum	0,0001	Terdapat 14 perpustakaan per 100.000 penduduk
b.	Rasio ketersediaan perpustakaan sekolah	0,0012	Terdapat 120 perpustakaan per 100.000 penduduk usia sekolah
c.	Rasio ketersediaan perpustakaan Perguruan tinggi	0,0013	Terdapat 129 perpustakaan per 100.000 penduduk usia pendidikan tinggi
2.	Persentase Perpustakaan Dipersepsi ber-SNP	29,26%	Terdapat 29,26% perpustakaan yang dipersepsi memenuhi standar nasional perpustakaan
3.	Rasio Ketercukupan Koleksi Berdasarkan IFLA/UNESCO	0,0531	Belum Memenuhi
4.	Kekurangan Jumlah Koleksi Berdasarkan IFLA/UNESCO	9.706.614	Kekurangan koleksi di PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT sebanyak 9.706.614
5.	Rasio Ketercukupan koleksi berdasarkan target Renstra	1 : 9	1 judul koleksi dapat diakses oleh 9 penduduk
6.	Rasio Ketercukupan Tenaga Perpustakaan	1: 17.317	1 tenaga perpustakaan melayani 17.317 penduduk
7.	Tingkat Kemanfaatan Perpustakaan	1,68%	Persentase jumlah kunjungan per hari dibagi per jumlah penduduk sebanyak 1,68%, belum ideal.



8.	Tingkat Keaktifan Kegiatan Sosialisasi & Pemanfaatan Perpustakaan	0,88%	Keaktifan dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan KIE dan pemanfaatan perpustakaan sebanyak 0,88%
9.	Tingkat Engagement Anggota Perpustakaan	2,67%	Terdapat 2,67% penduduk yang merupakan anggota perpustakaan

#### 4. Indeks IPLM Tahun 2023 Provinsi Nusa Tenggara Barat

Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri dari 10 Kab./Kota. Hasil nilai IPLM pada perpustakaan Kab./Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 disajikan pada table rekapitulasi berikut.

**Tabel 2.3.5 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2023**

Kab./Kota	UPLM1	UPLM2	UPLM3	UPLM4	UPLM5	UPLM6	UPLM7	SKOR IPLM
Kab. Lombok Barat	0,4207	0,1980	0,3460	0,0108	1,0000	0,2682	1,0000	46,34
Kab. Lombok Tengah	0,2390	0,0444	0,4847	0,0336	0,1339	1,0000	1,0000	41,94
Kab. Lombok Timur	0,2866	0,1398	0,4830	0,0328	1,0000	0,1661	1,0000	44,40
Kab. Sumbawa	0,4498	0,3745	0,2890	0,2257	0,3920	1,0000	1,0000	53,30
Kab. Dompu	0,2621	0,1394	0,0834	0,9231	1,0000	0,3722	1,0000	54,00
Kab. Bima	0,3365	0,2053	0,1184	0,0068	1,0000	0,2169	1,0000	41,20
Kab. Sumbawa Barat	0,5034	0,3885	1,0000	0,0501	1,0000	1,0000	1,0000	70,60
Kab. Lombok Utara	0,3349	0,1167	1,0000	0,0614	0,7712	1,0000	1,0000	61,20
Kota Mataram	0,8499	0,5105	1,0000	0,0325	0,4640	1,0000	1,0000	69,38
Kota Bima	0,5488	0,0673	1,0000	0,0740	0,8933	1,0000	1,0000	65,48
<b>Nusa Tenggara Barat</b>	<b>0,3554</b>	<b>0,1971</b>	<b>1,0000</b>	<b>0,0898</b>	<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>	<b>66,32</b>

Berdasarkan tabel di atas pencapaian IPLM Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 66,32 dan masuk dalam kategori Sedang. Tiga Kab./Kota dengan pencapaian IPLM tertinggi Kab. Sumbawa Barat 70,60 Kota Mataram 69,38; dan Kota Bima 65,48. Sedangkan tiga Kab./Kota dengan pencapaian IPLM terendah yaitu Kab. Bima 41,20; Kab. Lombok Tengah 41,94; dan Kab. Lombok Timur 44,40.

Berikut sajian rincian data nilai IPLM Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2023 beserta intepretasinya.

<b>Jumlah Penduduk (BPS 2022)</b>	<b>5.473.700</b>
<b>Jumlah Civitas Sekolah (BPS 2022)</b>	<b>1.290.235</b>
<b>Jumlah Civitas Akademika (BPS 2022)</b>	<b>151.389</b>
<b>Jumlah Kelembagaan (BPS 2022)</b>	<b>9.079</b>

NO.	INDIKATOR INDEKS PEMBANGUNAN	NILAI	INTERPRETASI
<b>INDEKS PEMBANGUNAN LITERASI MASYARAKAT</b>		<b>: 66,32</b>	<b>Sedang</b>
1.	Pemerataan Layanan Perpustakaan (UPLM1)	: 0,3554	Pencapaian layanan perpustakaan sebesar 36 persen dari standar
2.	Ketercukupan Koleksi Perpustakaan (UPLM2)	: 0,1971	Pencapaian koleksi perpustakaan sebesar 20 persen dari standar
3.	Ketercukupan Tenaga Perpustakaan (UPLM3)	: 1,000	Pencapaian tenaga perpustakaan sebesar 100 persen dari standar
4.	Tingkat Kunjungan Masyarakat per Hari (UPLM4)	: 0,0898	Pencapaian tingkat kunjungan masyarakat sebesar 9 persen dari standar
5.	Perpustakaan yang dibina Sesuai SNP (UPLM5)	: 1,000	Pencapaian perpustakaan yang dibina sesuai SNP sebesar 100 persen dari standar
6.	Keterlibatan Masyarakat Dalam Sosialisasi Perpustakaan (UPLM6)	: 1,000	Pencapaian keterlibatan masyarakat sebesar 100 persen dari standar
7.	Anggota Perpustakaan (UPLM7)	: 1,000	Pencapaian jumlah anggota perpustakaan sebesar 100 persen dari standar
<b>Keterangan Standar:</b>			
UPLM1: Jumlah kelembagaan			UPLM5: 22,39% dari jumlah perpustakaan
UPLM2: 2 x jumlah penduduk			UPLM6: 3% dari jumlah penduduk
UPLM3: 1 tenaga perpustakaan melayani 2500 penduduk			UPLM7: 2% dari jumlah penduduk
UPLM4: 2% dari jumlah penduduk			

NO.	INDIKATOR INDEKS PEMBANGUNAN	NILAI	INTERPRETASI
<b>1. Pemerataan Layanan Perpustakaan (UPLM1)</b>			
<b>Jumlah perpustakaan</b>		<b>: 3.264</b>	
a.	Rasio ketersediaan perpustakaan umum	: 0,00004	Terdapat 5 perpustakaan per 100.000 penduduk
b.	Rasio ketersediaan perpustakaan sekolah	: 0,00225	Terdapat 226 perpustakaan per 100.000 civitas sekolah
c.	Rasio ketersediaan perpustakaan Perguruan Tinggi	: 0,00051	Terdapat 51 perpustakaan per 100.000 civitas akademika
d.	Kekurangan perpustakaan untuk memenuhi standar	: 5.852	Kekurangan perpustakaan sebanyak 5.852 unit
<b>2. Ketercukupan Koleksi Perpustakaan (UPLM2)</b>			
<b>Jumlah koleksi perpustakaan</b>		<b>: 2.157.509</b>	
a.	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan	: 1 : 3	Setiap 1 koleksi dapat diakses oleh 3 penduduk
b.	Kekurangan koleksi perpustakaan untuk memenuhi standar	: 8.789.891	Kekurangan koleksi sebanyak 8.789.891 judul
<b>3. Ketercukupan Tenaga Perpustakaan (UPLM3)</b>			
<b>Jumlah tenaga perpustakaan</b>		<b>: 3.341</b>	
a.	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan	: 1 : 1.639	Setiap 1 pustakawan harus melayani 1.639 penduduk
b.	Kekurangan tenaga perpustakaan untuk memenuhi standar	: 0	Jumlah tenaga perpustakaan sudah memenuhi standar dan perlu dipertahankan

NO.	INDIKATOR INDEKS PEMBANGUNAN	NILAI	INTERPRETASI
<b>4.</b>	<b>Tingkat Kunjungan Masyarakat per Hari (UPLM4)</b>		
	<b>Jumlah kunjungan masyarakat /hari</b>	<b>: 9.829</b>	
a.	Persentase kunjungan masyarakat	: 0,18%	Terdapat 5 perpustakaan per 100.000 penduduk
b.	Kekurangan kunjungan masyarakat per hari untuk memenuhi standar	: 99,645	Terdapat 226 perpustakaan per 100.000 civitas sekolah
<b>5.</b>	<b>Perpustakaan yang dibina Sesuai SNP (UPLM5)</b>		
	<b>Jumlah perpustakaan yang dibina sesuai SNP</b>	<b>: 1.404</b>	
a.	Persentase perpustakaan yang dibina sesuai SNP	: 43,51%	Terdapat 43, 51 persen perpustakaan yang dibina sesuai SNP
b.	Kekurangan perpustakaan yang dibina sesuai SNP untuk memenuhi standar	: 0	Jumlah perpustakaan yang dibina sesuai SNP sudah memenuhi standar dan perlu dipertahankan
<b>6.</b>	<b>Keterlibatan Masyarakat dalam Sosialisasi Perpustakaan (UPLM6)</b>		
	<b>Jumlah keterlibatan masyarakat dalam sosialisasi perpustakaan</b>	<b>: 235.454</b>	
a.	Tingkat keterlibatan masyarakat dalam sosialisasi dan pemanfaatan perpustakaan	: 4,30%	Terdapat 4,3 persen masyarakat yang terlibat dalam sosialisasi perpustakaan
b.	Kekurangan masyarakat yang terlibat dalam sosialisasi perpustakaan untuk memenuhi standar	: 0	Jumlah masyarakat yang terlibat dalam sosialisasi perpustakaan sudah memenuhi standar dan perlu dipertahankan
<b>7.</b>	<b>Anggota Perpustakaan (UPLM7)</b>		
	<b>Jumlah anggota perpustakaan</b>	<b>: 934.188</b>	
a.	Persentase anggota perpustakaan	: 17,07%	Terdapat 17,07 persen masyarakat yang menjadi anggota perpustakaan
b.	Kekurangan anggota perpustakaan untuk memenuhi standar	: 0	Jumlah anggota perpustakaan sudah memenuhi standar dan perlu dipertahankan

**Tabel 2.3.6 Data Kunjungan Pemustaka  
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB**

No.	Jenis Layanan	Tahun			
		2020	2021	2022	2023
1.	UMUM	11.129	18.195	36.090	37.738
2.	Perpustakaan Keliling (Feeling)	1.525	546	2.790	1.020
3.	Layanan Internet	2.399	2.505	2.658	471
4.	Kunjungan Berkelompok	126	467	1.015	3.087
5.	Layanan Kearsipan	65	192	58	0
6.	Layanan Deposit	946	828	381	1.127
7.	Pocadi IC NTB		3.741	4.901	5.355
8.	NTBeLib		471	207	195
9.	Storytelling				711
<b>TOTAL</b>		<b>16.190</b>	<b>26.945</b>	<b>48.100</b>	<b>49.704</b>

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan bahwa penyelenggaraan kearsipan bertujuan menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya untuk perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan.

Untuk mewujudkan pencapaian tujuan penyelenggaraan kearsipan nasional perlu dilakukan pengawasan kearsipan secara nasional. Pengawasan Kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan. Pengawasan kearsipan dilakukan melalui kegiatan pengawasan atas pelaksanaan penyelenggaraan kearsipan dan penegakan peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan. Pengawasan kearsipan merupakan tanggung jawab Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebagai penyelenggara kearsipan nasional bersama daerah, yang dilakukan terhadap pencipta arsip tingkat pusat dan daerah.

Salah satu bentuk kinerja yang telah dilakukan Arsip Nasional bersama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB adalah pengawasan terhadap penyelenggaraan kearsipan pada Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dilaksanakan melalui monitoring tindak lanjut dari hasil pengawasan kearsipan yang dilakukan pada tahun sebelumnya guna memenuhi Indeks Pengawasan Arsip Nasional melalui Laporan Hasil Pengawasan Arsip Nasional (LHPKN) tingkat daerah.

Adapun prioritas yang menjadi sasaran adalah pada ketersediaan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya melalui pemenuhan 4 (empat) instrumen dasar yaitu: 1) Tata Naskah Dinas; 2) Klasifikasi Arsip; 3) Jadwal Retensi Arsip; dan 4) Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis. Selanjutnya dalam pengawasan kearsipan ditentukan tingkat perkembangan tindak lanjut yang dilaksanakan oleh setiap daerah. Selanjutnya Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan menjadi acuan dalam menentukan indeks kinerja penyelenggaraan kearsipan pada Kementerian/ Lembaga/ Daerah. Adapun tingkat perkembangan dibedakan menjadi 7 (tujuh) kategori yaitu:

1. Nilai diatas 90 s.d. 100 dengan kategori AA (sangat memuaskan);
2. Nilai diatas 80 s.d. 90 dengan kategori A (memuaskan);

3. Nilai diatas 70 s.d 80 dengan kategori BB (sangat baik);
4. Nilai diatas 60 s.d 70 dengan kategori B (baik);
5. Nilai diatas 50 s.d. 60 dengan kategori CC (cukup);
6. Nilai diatas 30 s.d. 50 dengan kategori C (kurang); dan
7. Nilai di atas 0 s.d 30 dengan kategori D (sangat kurang)

Hasil penilaian pengawasan kearsipan terhadap penyelenggaraan kearsipan penyelenggaraan kearsipan pada Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2020-2022 sebagai berikut:

**Tabel 2.3.2 Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan  
Provinsi Nusa Tenggara Barat**

No.	Nama Provinsi/Kab./Kota	2020		2021		2022		2023	
		Nilai	Kategori	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori
1.	Provinsi Nusa Tenggara Barat	43,69	C (kurang)	62,94	B (Baik)	-	B (Baik)	-	BB (sangat baik)
2.	Kota Mataram	83,66	A (memuaskan)	-	BB (sangat baik)	-	-	-	A (memuaskan)
3.	Kabupaten Lombok Barat	63,01	B (baik)	-	BB (sangat baik)	-	-	-	CC (cukup)
4.	Kabupaten Lombok Tengah	56,97	CC (cukup)	-	-	-	-	-	Tidak diberikan kategori
5.	Kabupaten Lombok Timur	41,87	C (kurang)	-	-	-	-	-	Tidak diberikan kategori
6.	Kabupaten Lombok Utara	34,33	C (kurang)	-	-	-	-	-	Tidak diberikan kategori
7.	Kabupaten Sumbawa Barat	83,66	A (memuaskan)	-	-	-	-	-	B (baik)
8.	Kabupaten Sumbawa	70,19	BB (sangat baik)	-	-	-	-	-	Tidak diberikan kategori
9.	Kabupaten Dompu	38,68	C (kurang)	-	-	-	-	-	Tidak diberikan kategori
10.	Kabupaten Bima	38,56	C (kurang)	-	-	-	-	-	Tidak diberikan kategori
11.	Kota Bima	50,55	CC (cukup)	-	-	-	-	-	Tidak diberikan kategori

Keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik ini sangat di pengaruhi oleh berbagai faktor. Pertama faktor internal merupakan peran yang sangat berpengaruh secara langsung terhadap praktek penyelenggaraan pelayanan seperti kepemimpinan yang efektif, kualitas sumber daya manusia, dan budaya birokrasi serta sistem insentif. Kemudian yang Kedua, bagaimana lingkungan eksternal organisasi tersebut, seperti budaya dan kondisi masyarakat, ikut mempengaruhi kinerja organisasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB segera melakukan

langkah-langkah kebijakan sinkronisasi dan koordinasi pengembangan perpustakaan dan kearsipan terkait pelayanan Perangkat Daerah dengan rencana pembangunan, pengembangan dan peningkatan fasilitas perpustakaan dan kearsipan di kabupaten/kota, desa/kelurahan, komunitas, sekolah menengah/khusus.

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB periode 2021-2023, meliputi pelayanan administrasi perkantoran, ketersediaan dan kelayakan sarana prasarana, pembinaan kapasitas sumber daya aparatur, jumlah pelaporan kinerja, manajemen asset, jumlah pengunjung perpustakaan pertahun, peningkatan perbaikan sistem administrasi kearsipan, jumlah arsip yang terselamatkan dibagi total arsip yang tersimpan di depo, pemeliharaan sarana/prasarana kearsipan, peningkatan kualitas SDM layanan informasi, dan peningkatan record center OPD, dengan rasio kinerja 100%. Namun pada pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan mengalami perubahan pada dasar hukum yang merupakan dasar dalam pelaksanaannya. Berikut adalah capaian kinerja tahun 2021-2023:



**Tabel 2.3.1 Capaian Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB  
Tahun 2021-2023**

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	-				BB	BB	BB			BB	BB	BB			100%	100%	100%
2.	Persentase Peningkatan Jumlah Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	-	-				100%	100%	100%			100%	99,62%	100%			100%	100%	100%
3.	Persentase Peningkatan Jumlah Pelestarian KCKR dan Naskah Kuno Milik Daerah	-	-				100%	100%	100%			100%	94,95%	98,17%			100%	100%	100%
4.	Persentase Peningkatan Jumlah Pengelolaan Arsip Dinamis dan Arsip Statis	-	-				100%	100%	100%			100%	99,66%	100%			100%	100%	100%
5.	Persentase Peningkatan Jumlah Arsip yang Terselamatkan	-	-				100%	100%	100%			100%	100%	100%			100%	100%	100%

**Tabel 2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021-2023**

Program	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			13.662.151.614,00	13.898.112.489,00	14.225.847.824			13.192.253.995,00	12.766.288.669,00	12.918.925.295			96,56%	91,86%	90,81%		
Program Pembinaan Perpustakaan			1.037.249.000,00	16.004.223.850,00	929.324.211			1.028.850.100,00	15.942.682.550,00	867.858.611			99,19%	99,62%	93,39%		
Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno			4.675.400,00	63.807.000,00	53.118.200			4.675.400,00	60.587.500,00	52.268.500			100%	94,95%	98,40%		
Program Pengelolaan Arsip			52.029.800,00	125.778.600,00	170.051.700			51.805.600,00	125.350.800,00	151.224.486			99,57%	99,66%	88,93		
Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip			1.146.200,00	9.409.400,00	27.637.500			1.146.000,00	9.409.400,00	26.888.860			99,98%	100%	97,29%		

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB**

Perkembangan dunia digital dapat menimbulkan dua sisi yang berlawanan dalam kaitannya dengan pengembangan literasi. Berkembangnya peralatan digital dan akses akan informasi dalam bentuk digital mempunyai tantangan sekaligus peluang. Dalam menghadapi tantangan dan peluang tersebut Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB memiliki peran sentral sebagai lembaga penyedia informasi dengan tuntutan perkembangan masyarakat yang sehat dan cerdas.

Dengan memperhatikan kondisi saat ini, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB dalam melakukan penyelenggaraan pembangunan masyarakat dirasa masih belum optimal antara lain pembinaan perpustakaan berbasis literasi yang belum optimal, pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno daerah yang masih kurang disebabkan pemahaman masyarakat dan penerbit tentang Undang-undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam masih kurang, pengelolaan arsip serta perlindungan dan penyelamatan arsip yang belum maksimal.

Pembangunan masyarakat sangat bergantung pada kemampuan manajemen organisasi tersebut untuk membawa organisasinya melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis. Oleh karena itu analisis terhadap lingkungan merupakan kegiatan yang harus dilakukan. Analisis terhadap lingkungan dilakukan baik di lingkungan internal maupun di lingkungan eksternal. Analisis di lingkungan eksternal untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB.

Untuk menghadapi tantangan dan memenuhi harapan kepada Pemerintah Daerah, diperlukan perencanaan yang berkualitas, sinergis, dan kredibel untuk mencapai tujuan Pembangunan Daerah periode 2024-2026.

Analisis lingkungan eksternal menjadi perhatian untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB. Beberapa tantangan pengembangan pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB pada periode 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Semakin berkembangnya informasi digital di internet;

2. Kebutuhan masyarakat akan informasi semakin meningkat;
3. Jangkauan layanan perpustakaan dan kearsipan yang masih belum maksimal untuk daerah terpencil;
4. Kurangnya kesadaran minat dan budaya baca di masyarakat; dan
5. Kesadaran tentang arsip di tingkat masyarakat, swasta dan pemerintah daerah yang masih kurang.

Berikut beberapa peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB pada periode 2024-2026, adalah sebagai berikut:

- a. Tersedianya aplikasi layanan berbasis digital bagi pemustaka secara daring (*online*) melalui aplikasi iDeposit, Srikandi, JIKN dan NTBelib;
- b. Kemudahan masyarakat dalam mengakses koleksi dan arsip berbasis digital secara daring (*online*);
- c. Meningkatnya minat dan budaya baca masyarakat;
- d. Meningkatnya kesadaran tentang arsip di tingkat masyarakat, swasta dan pemerintah daerah; dan
- e. Adanya regulasi yang mengatur urusan bidang perpustakaan dan kearsipan.

## **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI NTB**

### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB sebagai salah satu lembaga penyedia, pengelola informasi dan pengembangan kearsipan harus bisa menyediakan informasi yang diperlukan oleh para penggunanya, baik yang tersedia diperpustakaan dan kearsipan secara fisik maupun yang bisa diakses via internet. Berdasarkan hal tersebut, kondisi ideal Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB yang diharapkan meliputi:

1. Meningkatnya kompetensi SDM;
2. Tersedianya kebutuhan akan sarana dan prasarana penunjang kegiatan perpustakaan dan kearsipan;
3. Optimalnya pelaksanaan pembinaan perpustakaan berbasis literasi;
4. Tersedianya koleksi digital dan aplikasi penunjang pelayanan koleksi digital;
5. Terselamatkannya arsip daerah.

Peran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB dalam pembangunan daerah tahun 2024-2026 adalah meningkatkan pembangunan masyarakat melalui upaya pembinaan perpustakaan di masyarakat dan sekolah menengah atas, pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno daerah, pengelolaan arsip baik dinamis maupun statis serta perlindungan dan penyelamatan arsip secara berdaya guna dan berhasil guna, dengan mengutamakan upaya pemanfaatan koleksi perpustakaan dan arsip berbasis digital (literasi) melalui daring (*online*).

Identifikasi permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan bidang perpustakaan dan kearsipan di Provinsi NTB sangat perlu dilakukan untuk mendapatkan gambaran dan pemetaan atas kondisi real yang dihadapi oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi NTB dalam melakukan pengembangan dan pembinaan bidang perpustakaan dan kearsipan. Dengan memperhatikan dan menganalisis secara mendalam kondisi lingkungan internal dan eksternal yang

begitu dinamis, dapat diidentifikasi dan dirumuskan permasalahan yang menjadi isu sesuai dengan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah dalam pembangunan bidang perpustakaan dan kearsipan di Provinsi NTB sebagai berikut:

1. Sarana dan prasana yang dirasa masih kurang memadai;
2. Pemanfaatan akan teknologi belum maksimal;
3. Kompetensi Sumber Daya Manusia belum maksimal; dan
4. Belum optimalnya aplikasi berbasis digital yang dilayankan secara daring (*online*).

### **3.2 Telaahan Renstra Kementerian/ Lembaga, Kabupaten/Kota**

Berdasarkan Rencana Strategis Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Tahun 2020-2024 maka Visi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia disesuaikan dengan Visi Presiden periode 2020-2024 adalah **“Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui penguatan budaya literasi”**.

Selanjutnya Misi Perpustakaan Nasional disesuaikan dengan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan Nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu agenda ke-4 revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Maka Perpustakaan Nasional merumuskan Misi:

**“Meningkatkan Perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan, Pelayanan Prima Perpustakaan, dan Pelestarian Bahan Pustaka dan Naskah Nusantara”**.

Berdasarkan Renstra Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Tahun 2020-2024, maka Visi ANRI adalah **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**.

Misi Arsip Nasional (ANRI) sebagai berikut:

1. Memberdayakan arsip sebagai tulang punggung manajemen pemerintahan dan pembangunan;
2. Memberdayakan arsip sebagai bukti akuntabilitas kinerja organisasi;
3. Memberdayakan arsip sebagai alat bukti sah;

4. Melestarikan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
5. Memberikan akses arsip kepada publik untuk kepentingan pemerintahan, pembangunan, penelitian dan ilmu pengetahuan untuk kesejahteraan rakyat sesuai peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah kearsipan demi kemaslahatan bangsa.

Berdasarkan Renstra Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota **Mataram Tahun 2016-2021**, maka visi **"Terwujudnya pengelolaan Kearsipan dan Perpustakaan sebagai informasi terdepan guna mencerdaskan masyarakat."** Dengan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesadaran aparatur terhadap pentingnya arsip melalui program sosialisasi kearsipan;
2. Meningkatkan pengembangan system kearsipan melalui pelayanan prima;
3. Melestarikan arsip dan bahan pustaka yang memiliki nilai-nilai agama dan budaya daerah;
4. Memanfaatkan dan meningkatkan koleksi arsip daerah dan bahan pustaka sebagai sumber informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi;
5. Meningkatkan profesionalisme pelayanan dan pengelolaan perpustakaan;
6. Menggelorakan semangat minat baca dalam rangka peningkatan sumber daya manusia; dan
7. Mengembangkan kerjasama, koordinasi dan kemitraan.

Berdasarkan Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lombok Barat Tahun 2015-2019. Visi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lombok Barat **"Terwujudnya Masyarakat Lombok Barat yang Amanah, Sejahtera dan Berprestasi dengan Dilandasi Nilai Patut, Patuh, Patju (LOBAR MANTAP)"**. Dengan misi "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Melayani serta Berbasis Transparansi, Akuntabilitas yang Efisien dan Memiliki Integritas".

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka telaahan terhadap Renstra K/L dan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB pada Rancangan Awal Renstra bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat ataupun faktor

pendorong dari pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB yang ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB yang nantinya dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam perumusan isu-isu strategis. Berikut adalah faktor-faktor penghambat dan pendorong Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB dengan memperhatikan renstra K/L, berikut adalah faktor penghambat dan pendorong pelayanan perpustakaan dan kearsipan:

Faktor penghambat, antara lain:

- Tingkat ketercukupan Koleksi yang masih kurang memadai baik koleksi digital dan konvensional;
- Tingkat Ketercukupan Tenaga Perpustakaan dan arsiparis dirasa masih kurang;
- Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan/Pemustaka dan Kearsipan belum optimal; dan
- Terbatasnya sarana prasarana perpustakaan yang masih kurang.

Faktor Pendorong, antara lain:

- Ketersediaan koleksi konvensional dan digital melalui pengadaan koleksi perpustakaan dan alih media koleksi perpustakaan dan alih media arsip;
- Kemudahan masyarakat dalam mengakses koleksi dan arsip berbasis digital secara daring (*online*);
- Meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat, melalui promosi perpustakaan dan ketersediaan kegiatan lomba tingkat TK, Sekolah dan Perguruan Tinggi;
- Meningkatkan kesadaran tentang arsip di tingkat masyarakat, swasta dan pemerintah daerah, melalui pembinaan perpustakaan dan pembinaan kearsipan; dan
- Ketersediaan regulasi yang mengatur urusan bidang perpustakaan dan kearsipan.



### **3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

RTRW Provinsi Nusa Tenggara Barat yang telah diatur melalui Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2029.

Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Strategi pengembangan sarana dan prasarana pendukung pengembangan kawasan strategis provinsi meliputi:

1. Mengembangkan sarana prasarana sesuai kebutuhan pengembangan kawasan;
2. Meningkatkan peran swasta dan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana; dan
3. Mengembangkan sarana prasarana secara terpadu dan berkelanjutan.

Sehubungan dengan sarana dan prasarana pelayanan publik, isu yang harus menjadi perhatian bukan sekedar pencapaiannya saja, namun masih banyak hal lain yang sangat memiliki keterkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah bahwa sebagai pengemban tugas pelayanan Perpustakaan dan Arsip berupaya peningkatan minat baca masyarakat berbasis literasi dan penyelamatan arsip daerah.

Memperhatikan tingkat persebaran penduduk di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai daerah pariwisata dengan memperhatikan kualitas lingkungan dengan pengembangan ruang terbuka hijau maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan harus dapat memberikan pelayanan yang maksimal dengan memanfaatkan ruang terbuka hijau sebagai Taman Baca Masyarakat guna peningkatan minat baca sebagai sarana pembelajar sepanjang hayat melalui layanan gelar baca buku santai yang dilaksanakan pada hari minggu dan pelayanan arsip keliling.

### 3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dimasa datang. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya.

Proses perumusan isu strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB melalui kajian isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi menuju kualitas kondusifitas daerah menuju *democratic governance*. Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB melalui pengembangan minat dan budaya baca berbasis literasi serta pengolahan dan pelestarian arsip dituntut lebih humanis, antisipatif, responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional yang berdampak pada kondusifitas daerah. Oleh karena itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Dalam upaya menata dan mengembangkan perpustakaan dan arsip dalam waktu 5 tahun kedepan, berdasarkan hal tersebut isu strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB, sebagai berikut:

a. Bidang urusan Perpustakaan

- Masih kurangnya Sarana Prasarana pendukung peningkatan minat dan daya baca masyarakat, terutama mobil Perpustakaan Keliling untuk menjangkau wilayah wilayah pelosok di Provinsi NTB;
- Masih kurangnya Koleksi bahan bacaan yang tersedia dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada;
- Belum terwujudnya jumlah dan kapasitas perpustakaan yang memadai, terutama perpustakaan Desa, dimana berdasarkan data dari Kemendes & PDT, dari 1005 Desa/Kelurahan yang ada di NTB, baru 688 Desa yang memiliki Perpustakaan Desa; dan
- Masih minimnya dukungan untuk Pengembangan Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.

b. Bidang urusan Kearsipan

- Belum optimalnya sistem administrasi kearsipan daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang berkualitas;
- Belum optimalnya penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah; dan
- Belum terwujudnya kesadaran masyarakat akan pentingnya arsip.

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

### 4.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh perangkat daerah. Selanjutnya sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat dicapai, dan diupayakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur.

Berdasarkan hal tersebut, maka dalam upaya mendukung Rencana Pembangunan Daerah, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan perlu merumuskan tujuan dan sasaran strategis yang tertuang dalam Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026. Terdapat 2 (dua) Tujuan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB berdasarkan pada Tujuan Rencana Pembangunan Daerah, yaitu **"Terwujudnya Peningkatan Kualitas Manusia Yang Kompetitif, Unggul, Andal dan Taqwa (Kuat) dengan Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM)"** dan Sasaran RPD **"Meningkatnya kualitas sumber daya manusia Nusa Tenggara Barat yang Kompetitif, Unggul, Andal dan Taqwa (KUAT) dengan indikator Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)"**. Selanjutnya tujuan dan sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB dalam mendukung tercapainya tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD), yaitu Tujuan 1) Terwujudnya pembangunan literasi masyarakat; 2) Terwujudnya Tertib Arsip Dalam Penyelenggaraan Kearsipan pada Pemerintah Provinsi NTB, dengan 2 sasaran yaitu 1) Meningkatkan Pemanfaatan Perpustakaan dan 2) Meningkatkan Pengelolaan Arsip Perangkat Daerah yang Tertib.

Berdasarkan hal tersebut merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategis dan sarana untuk melakukan evaluasi yang dilaksanakan dalam rangka penyusunan Rencana Awal Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB Tahun 2024-2026, sebagaimana tertuang pada table 4.1.1.

**Tabel 4.1.1**  
**Tujuan dan Sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB**  
**Tahun 2024-2026**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-			Keterangan
				2024	2025	2026	
1.	<b>Terwujudnya pembangunan literasi masyarakat</b>		<b>Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat</b>	<b>68,5</b>	<b>69</b>	<b>70</b>	<b>Formulasi:</b> Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang dirilis oleh Perpustakaan Nasional RI setiap tahun
		Meningkatnya Pemanfaatan Perpustakaan	Angka Kunjungan Pemustaka	52.900	58.200	64.000	<b>Formulasi</b> Jumlah kunjungan pemustaka (Orang) yang datang berkunjung ke perpustakaan setiap tahun
			Persentase Jangkauan Layanan Perpustakaan Mobile ke Desa	20	25	30	<b>Formulasi</b> Jumlah desa/ kelurahan yang dikunjungi perpustakaan keliling setiap tahun dibagi jumlah seluruh desa/ kelurahan di provinsi NTB x 100%
2.	<b>Terwujudnya Tertib Arsip Dalam Penyelenggaraan Kearsipan pada Pemerintah Provinsi NTB</b>		<b>Persentase Perangkat Daerah dan LKD Kab/Kota dengan Nilai Pengawasan Kearsipan B Ke Atas</b>	<b>40</b>	<b>45</b>	<b>50</b>	<b>Formulasi</b> Jumlah Perangkat Daerah dan LKD Kab/Kota dengan Nilai Pengawasan Kearsipan B Ke Atas dibagi Jumlah seluruh Perangkat Daerah dan LKD Kab/Kota dibagi 100%
		Meningkatnya Pengelolaan Arsip Perangkat Daerah yang Tertib	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Tertib	45	50	55	<b>Formulasi</b> Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Mengelola Arsip Secara Tertib dibagi jumlah seluruh Perangkat daerah yang ada dikali 100%
			Persentase Arsip yang Terselamatkan	100	100	100	<b>Formulasi</b> Jumlah arsip yang terselamatkan di bagi jumlah arsip yang ada di kali 100%

## 4.2 *Cascading* Kinerja Perangkat Daerah

*Cascading* (penjabaran) kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level perencanaan yang lebih tinggi hingga level yang lebih rendah/detil.

Sesuai amanat Inmendagri Nomor 52 Tahun 2022, dokumen Rencana Pembangunan Daerah harus memuat *cascading* kinerja mulai dari tujuan sampai dengan *outcome* hingga indikator masing-masing kinerja. Berikut adalah *table cascading* kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB.

**Tabel 4.2.1 Cascading Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat  
Tahun 2024-2026**

Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Baseline 2022	Target			Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Baseline 2022	Target			Perangkat Daerah Pendukung	Program Pembangunan
				2024	2025	2026					2024	2025	2026		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>
Terwujudnya pembangunan literasi masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	-	68,5	69	70	Meningkatnya Pemanfaatan Perpustakaan	Angka Kunjungan Pemustaka	Orang	48.100	52.900	58.200	64.000		1. Program Pembinaan Perpustakaan dan 2. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno
								Persentase Jangkauan Layanan Perpustakaan Mobile ke Desa	%	10	20	25	30		
Terwujudnya Tertib Arsip Dalam Penyelenggaraan Kearsipan pada Pemerintah Provinsi NTB	Persentase Perangkat Daerah dan LKD Kab/Kota dengan Nilai Pengawasan Kearsipan B Ke Atas	%	30	40	45	50	Meningkatnya Pengelolaan Arsip Perangkat Daerah yang Tertib	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Tertib	%	35	45	50	55		1. Program Pengelolaan Arsip dan 2. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
								Persentase Arsip yang Terselamatkan	%	83,33	100	100	100		

## **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

### **5.1 Strategi dan Arah Kebijakan**

Strategi merupakan rangkaian tahapan pemikiran-pemikiran secara konseptual analitis dan komprehensif tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk memperlancar atau memperkuat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk mengarahkan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 3 (tiga) tahun dan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya, diperlukan pedoman berupa arah kebijakan.

Arah kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB.

Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB memperhatikan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB sebagai perangkat daerah yang merumuskan perencanaan pembangunan dalam lingkup provinsi, maupun dalam lingkup organisasi internalnya. Sebagai perangkat daerah yang melayani informasi dalam bentuk buku maupun digital serta pengolahan arsip daerah bertugas menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, penyelarasan, fasilitasi dan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi. Tugas tersebut diwujudkan melalui fungsi perumusan kebijakan teknis, dukungan teknis, pengendalian dan evaluasi, serta penyediaan data untuk pengembangan minat dan budaya baca berbasis digital dan pengolahan arsip daerah.

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta dengan mencermati isu-isu strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB, maka strategi dan kebijakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024-2026 sebagaimana table 5.1.1, sebagai berikut.



**Tabel 5.1.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan**

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Terwujudnya Literasi Membaca Masyarakat	Meningkatnya Pemanfaatan Perpustakaan	Meningkatkan gerakan sosial literasi ( <i>influencer</i> ), pegiat literasi, penguatan sistem informasi perpustakaan yang terpadu	Peningkatan akses layanan perpustakaan dan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan, inovatif, kreatif dan berkarakter
Terwujudnya Tertib Arsip Dalam Penyelenggaraan Kearsipan pada Pemerintah Provinsi NTB	Meningkatnya Pengelolaan Arsip Perangkat Daerah yang Tertib	Meningkatkan pengawasan arsip daerah	Peningkatan ketersediaan arsip daerah

## BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Program kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana program ditetapkan rencana capaian kinerja, terutama untuk Sasaran Program (*outcome*) dan sasaran kegiatan (*output*) dimana penyusunan program dan kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu, sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
2. Program Pembinaan Perpustakaan;
3. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno;
4. Program Pengelolaan Arsip; dan
5. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip.

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB periode Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel 6.1.1, sebagai berikut :

**Tabel 6.1.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan  
Provinsi Nusa Tenggara Barat 2024-2026**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		2027		2028		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			100%	26.396.586.454	100%	24.172.182.496	100%	24.935.282.340					100%	75.504.051.290	DPKP NTB	Kota Mataram
		2.23.2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN			100%	26.396.586.454	100%	24.172.182.496	100%	24.935.282.340					100%	75.504.051.290	DPKP NTB	Kota Mataram
		2.23.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		BB	17.174.600.854	BB	17.427.696.896	BB	18.167.171.740					BB	52.769.469.490	DPKP NTB	Kota Mataram
		2.23.01.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun		10 Dokumen	163.000.000	10 Dokumen	163.000.000	10 Dokumen	163.000.000					10 Dokumen	489.000.000	DPKP NTB	Kota Mataram
		2.23.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1 Dokumen	45.000.000	1 Dokumen	45.000.000	1 Dokumen	45.000.000					1 Dokumen	135.000.000	DPKP NTB	Kota Mataram
		2.23.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000					1 Dokumen	60.000.000	DPKP NTB	Kota Mataram
		2.23.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Dokumen	18.000.000	1 Dokumen	18.000.000	1 Dokumen	18.000.000					1 Dokumen	54.000.000	DPKP NTB	Kota Mataram

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		2027		2028		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		2.23.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000					1 Dokumen	45.000.000	DPKP NTB	Kota Mataram
		2.23.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000					1 Dokumen	45.000.000	DPKP NTB	Kota Mataram
		2.23.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		5 Laporan	20.000.000	5 Laporan	20.000.000	5 Laporan	20.000.000					5 Laporan	60.000.000	DPKP NTB	Kota Mataram
		2.23.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4 Laporan	30.000.000	4 Laporan	30.000.000	4 Laporan	30.000.000					4 Laporan	90.000.000	DPKP NTB	Kota Mataram
		2.23.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	13.887.520.854	100%	14.575.496.896	100%	15.297.871.740					100%	43.760.889.490	DPKP NTB	Kota Mataram
		2.23.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		95 Orang/ Bulan	13.759.520.854	100 Orang/ Bulan	14.447.496.896	105 Orang/ Bulan	15.169.871.740					105 Orang/ Bulan	43,376,889,490	DPKP NTB	Kota Mataram
		2.23.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		4 Dokumen	70.000.000	4 Dokumen	315.000.000	4 Dokumen	330.750.000					4 Dokumen	210.000.000	DPKP NTB	Kota Mataram
		2.23.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1 Dokumen	8.000.000	1 Dokumen	52.500.000	1 Dokumen	55.125.000					1 Dokumen	24.000.000	DPKP NTB	Kota Mataram
		2.23.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		2 Dokumen	7.000.000	2 Dokumen	15.750.000	2 Dokumen	16.537.500					2 Dokumen	21.000.000	DPKP NTB	Kota Mataram
		2.23.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	13.000.000	1 Laporan	26.250.000	1 Laporan	27.562.500					1 Laporan	39.000.000	DPKP NTB	Kota Mataram

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		2027		2028		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		2.23.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000					1 Dokumen	30.000.000	DPKP NTB	Kota Mataram
		2.23.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD		10 Laporan	10.000.000	10 Laporan	10.000.000	10 Laporan	10.000.000					10 Laporan	30.000.000	DPKP NTB	Kota Mataram
		2.23.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		2 Dokumen	10.000.000	2 Dokumen	10.000.000	2 Dokumen	10.000.000					2 Dokumen	30.000.000	DPKP NTB	Kota Mataram
		2.23.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah		100 %	31.000.000	100 %	31.000.000	100 %	31.000.000					100 %	93.000.000	DPKP NTB	Kota Mataram
		2.23.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		1 Dokumen	500.000	1 Dokumen	500.000	1 Dokumen	500.000					1 Dokumen	1.500.000	DPKP NTB	Kota Mataram
		2.23.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah	umlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	-	-			1 Dokumen	15.000.000	DPKP NTB	Kota Mataram
		2.23.01.1.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	umlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		1 Laporan	1.500.000	1 Laporan	1.500.000	1 Laporan	1.500.000					1 Laporan	4.500.000	DPKP NTB	Kota Mataram
		2.23.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah	umlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		2 Laporan	500.000	2 Laporan	500.000	2 Laporan	500.000	-	-	-	-	2 Laporan	1.500.000	DPKP NTB	Kota Mataram
		2.23.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	umlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		2 Laporan	500.000	2 Laporan	500.000	2 Laporan	500.000					2 Laporan	1.500.000	DPKP NTB	Kota Mataram
		2.23.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	umlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		2 Laporan	21.000.000	2 Laporan	21.000.000	2 Laporan	21.000.000					2 Laporan	63.000.000	DPKP NTB	Kota Mataram

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		2027		2028		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		2.23.01.1.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		1 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	2.000.000					1 Dokumen	6.000.000		
		2.23.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Pendapatan Daerah yang disusun		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPKP NTB	Kota Mataram
		2.23.01.1.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPKP NTB	Kota Mataram
		2.23.01.1.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPKP NTB	Kota Mataram
		2.23.01.1.04.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPKP NTB	Kota Mataram
		2.23.01.1.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah (Sub kegiatan berlaku untuk karakter retribusi yang membutuhkan pendataan dan pendaftaran)	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPKP NTB	Kota Mataram
		2.23.01.1.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah (Sub kegiatan berlaku untuk karakter retribusi yang membutuhkan pendataan dan pendaftaran)	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPKP NTB	Kota Mataram
		2.23.01.1.04.0006	Penetapan Wajib Retribusi Daerah (Sub kegiatan berlaku untuk karakter retribusi yang membutuhkan pendataan dan pendaftaran)	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPKP NTB	Kota Mataram
		2.23.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPKP NTB	Kota Mataram
		2.23.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah		2 Dokumen	80.080.000	2 Dokumen	86.200.000	2 Dokumen	92.300.000					2 Dokumen	258.580.000	DPKP NTB	Kota Mataram
		2.23.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		5 Unit	15.000.000	5 Unit	15.000.000	5 Unit	15.000.000					5 Unit	45.000.000	DPKP NTB	Kota Mataram
		2.23.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		95 Paket	45.000.000	100 Paket	50.000.000	105 Paket	55.000.000	-	-	-	-	105 Paket	150.000.000	DPKP NTB	Kota Mataram

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		2027		2028		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		2.23.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		2 Dokumen	18.000.000	2 Dokumen	18.900.000	2 Dokumen	19.800.000					2 Dokumen	56.700.000	DPKP NTB	Kota Mataram
		2.23.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		2 Dokumen	1,083,000	2 Dokumen	1.300.000	2 Dokumen	1.500.000					2 Dokumen	3.880.000	DPKP NTB	Kota Mataram
		2.23.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	1.000.000					1 Dokumen	3.000.000	DPKP NTB	Kota Mataram
		2.23.01.1.05.0006	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan		-	-	-	-	-	-					-	-	DPKP NTB	Kota Mataram
		2.23.01.1.05.0007	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas		-	-	-	-	-	-					-	-	DPKP NTB	Kota Mataram
		2.23.01.1.05.0008	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan		-	-	-	-	-	-					-	-	DPKP NTB	Kota Mataram
		2.23.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		-	-	-	-	-	-					-	-	DPKP NTB	Kota Mataram
		2.23.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		-	-	-	-	-	-					-	-	DPKP NTB	Kota Mataram
		2.23.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		-	-	-	-	-	-					-	-	DPKP NTB	Kota Mataram
		2.23.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah		100%	358.000.000	100%	362.000.000	100%	368.000.000					100%	1.088.000.000	DPKP NTB	Kota Mataram
		2.23.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		11 Paket	25.000.000	11 Paket	27.000.000	11 Paket	30.000.000					11 Paket	82.000.000	DPKP NTB	Kota Mataram
		2.23.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		15 Paket	45.000.000	20 Paket	47.000.000	25 Paket	50.000.000					25 Paket	142.000.000	DPKP NTB	Kota Mataram
		2.23.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		-	-	-	-	-	-					-	-	DPKP NTB	Kota Mataram

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		2027		2028		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		2.23.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		15 Paket	20.000.000	15 Paket	20.000.000	15 Paket	20.000.000					15 Paket	60.000.000	DPKP NTB	Kota Mataram
		2.23.01.1.06.0005	Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		2 Paket	15.000.000	2 Paket	15.000.000	2 Paket	15.000.000					2 Paket	45.000.000	DPKP NTB	Kota Mataram
		2.23.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		120 Dokumen	18.000.000	120 Dokumen	18.000.000	120 Dokumen	18.000.000					120 Dokumen	54.000.000	DPKP NTB	Kota Mataram
		2.23.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		-	-	-	-	-	-					-	-	DPKP NTB	Kota Mataram
		2.23.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	15.000.000					1 Laporan	45.000.000	DPKP NTB	Kota Mataram
		2.23.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Laporan	200.000.000	1 Laporan	200.000.000	1 Laporan	200.000.000					1 Laporan	600.000.000	DPKP NTB	Kota Mataram
		2.23.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		2 Dokumen	20.000.000	2 Dokumen	20.000.000	2 Dokumen	20.000.000					2 Dokumen	60.000.000	DPKP NTB	Kota Mataram
		2.23.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		-	-	-	-	-	-					-	-	DPKP NTB	Kota Mataram
		2.23.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah		10 Unit	1.100.000.000	10 Unit	650.000.000	10 Unit	650.000.000					10 Unit	2.400.000.000	DPKP NTB	Kota Mataram
		2.23.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		-	-	-	-	-	-					-	-	DPKP NTB	Kota Mataram
		2.23.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		1 Unit	450.000.000	-	-	-	-					1 Unit	450.000.000	DPKP NTB	Kota Mataram
		2.23.01.1.07.0003	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan		-	-	-	-	-	-					-	-	DPKP NTB	Kota Mataram



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
						2024		2025		2026		2027		2028				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		2.23.01.1.07.0004	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPKP NTB	Kota Mataram	
		2.23.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		1 Paket	200.000.000	1 Paket	200.000.000	2 Paket	200.000.000					2 Paket	600.000.000	DPKP NTB	Kota Mataram
		2.23.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan Mesin dan Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		8 Unit	450.000.000	8 Unit	450.000.000	8 Unit	450.000.000					8 Unit	1.350.000.000	DPKP NTB	Kota Mataram
		2.23.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPKP NTB	Kota Mataram
		2.23.01.1.07.0008	Pengadaan Aset yang Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPKP NTB	Kota Mataram
		2.23.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPKP NTB	Kota Mataram
		2.23.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPKP NTB	Kota Mataram
		2.23.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPKP NTB	Kota Mataram
		2.23.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		100%	1.170.000.000	100%	1.175.000.000	100%	1.180.000.000					100%	3.525.000.000	DPKP NTB	Kota Mataram
		2.23.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		2 Laporan	10,000,000	2 Laporan	10,000,000	2 Laporan	10,000,000					2 Laporan	30.000.000	DPKP NTB	Kota Mataram
		2.23.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		4 Laporan	350.000.000	4 Laporan	350.000.000	4 Laporan	350.000.000					4 Laporan	1.050.000.000	DPKP NTB	Kota Mataram
		2.23.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPKP NTB	Kota Mataram

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		2027		2028					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		2.23.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Layanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		24 Laporan	810.000.000	24 Laporan	815.000.000	24 Laporan	820.000.000				24 Laporan	2.445.000.000	DPKP NTB	Kota Mataram	
		2.23.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara		48 Unit	385.000.000	48 Unit	385.000.000	48 Unit	385.000.000				48 Unit	1.155.000.000	DPKP NTB	Kota Mataram	
		2.23.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		7 Unit	115.000.000	7 Unit	115.000.000	7 Unit	115.000.000				7 Unit	345.000.000	DPKP NTB	Kota Mataram	
		2.23.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		41 Unit	20.000.000	41 Unit	20.000.000	41 Unit	20.000.000				41 Unit	60.000.000	DPKP NTB	Kota Mataram	
		2.23.01.1.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPKP NTB	Kota Mataram	
		2.23.01.1.09.0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPKP NTB	Kota Mataram	
		2.23.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPKP NTB	Kota Mataram	
		2.23.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		48 Unit	100.000.000	48 Unit	100.000.000	48 Unit	100.000.000				48 Unit	300.000.000	DPKP NTB	Kota Mataram	
		2.23.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPKP NTB	Kota Mataram	
		2.23.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPKP NTB	Kota Mataram	
		2.23.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		2 Unit	75.000.000	2 Unit	75.000.000	2 Unit	75.000.000				2 Unit	225.000.000	DPKP NTB	Kota Mataram	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
						2024		2025		2026		2027		2028				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		2.23.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPKP NTB	Kota Mataram	
		2.23.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		2 Unit	75.000.000	2 Unit	75.000.000	2 Unit	75.000.000					2 Unit	225.000.000	DPKP NTB	Kota Mataram
		2.23.01.1.09.0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/ Rehabilitasi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPKP NTB	Kota Mataram

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		2027		2028		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targ et	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp		
Terwujudnya pembangunan literasi masyarakat				Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat													DPKP NTB	Nusa Tenggara Barat	
	Meningkatnya Pemanfaatan Perpustakaan			Angka Kunjungan Pemustaka													DPKP NTB	Nusa Tenggara Barat	
				Persentase Jangkauan Layanan Perpustakaan Mobile ke Desa															
		2.23.02	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan		100%	6.950.000.000	100%	4.472.500.000	100 %	4.496.125.000					100 %	15.918.625.000	DPKP NTB	Nusa Tenggara Barat
		2.23.02.1.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan		60 Perpustakaan	3.800.000.000	63 Perpustakaan	3.822.500.000	65 Perpustakaan	3.846.125.000					188 Perpustakaan	11.468.625.000	DPKP NTB	Nusa Tenggara Barat
		2.23.02.1.01.0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenanganny a		50 Perpustakaan	300.000.000	53 Perpustakaan	315.000.000	55 Perpustakaan	330.750.000					55 Perpustakaan	945,750,000	DPKP NTB	Nusa Tenggara Barat
		2.23.02.1.01.0003	Pengembanga n Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	Jumlah koleksi perpustakaan khas daerah tingkat provinsi yang Dikembangkan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPKP NTB	Nusa Tenggara Barat
		2.23.02.1.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Peroustakaan	Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khusus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Peroustakaan		20 Perpustakaan	150.000.000	21 Perpustakaan	157.500.000	23 Perpustakaan	165.375.000					23 Perpustakaan	472,875,000	DPKP NTB	Nusa Tenggara Barat

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		2027		2028		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		2.23.02.1.01.0005	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Provinsi	Jumlah Perpustakaan khusus yang Dibina sesuai kewenangan provinsi dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPKP NTB	Nusa Tenggara Barat	
		2.23.02.1.01.0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi		100 Orang	150.000.000	100 Orang	150.000.000	100 Orang	150.000.000	-	-	-	-	100 Orang	450.000.000	DPKP NTB	Nusa Tenggara Barat
		2.23.02.1.01.0007	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang Dikembangkan Melalui Peningkatan Koleksi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPKP NTB	Nusa Tenggara Barat
		2.23.02.1.01.0008	Pengembangan Perpustakaan Deposit yang Dikembangkan	Jumlah Perpustakaan Deposit yang Dikembangkan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPKP NTB	Nusa Tenggara Barat
		2.23.02.1.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan		20.000 Eksemplar	1.500.000.000	20.000 Eksemplar	1.500.000.000	20.000 Eksemplar	1.500.000.000	-	-	-	-	20.000 Eksemplar	4.500.000.000	DPKP NTB	Nusa Tenggara Barat
		2.23.02.1.01.0011	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat		8.500 Dokumen	850.000.000	9.000 Dokumen	850.000.000	9.500 Dokumen	850.000.000	-	-	-	-	8.500 Dokumen	2.550.000.000	DPKP NTB	Nusa Tenggara Barat
		2.23.02.1.01.0012	Pengukuran Tingkat Gemar Membaca Masyarakat Tingkat Provinsi	Capaian tingkat gemar membaca masyarakat tingkat Provinsi		62 Nilai	200.000.000	62 Nilai	200.000.000	62 Nilai	200.000.000	-	-	-	-	62 Nilai	600.000.000	DPKP NTB	Nusa Tenggara Barat
		2.23.02.1.01.0013	Pengukuran Angka Kunjungan Pemustaka Tingkat Provinsi	Capaian Angka Kunjungan Pemustaka tingkat Provinsi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPKP NTB	Nusa Tenggara Barat
		2.23.02.1.01.0014	Kerjasama Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi	Jumlah kerjasama dan peningkatan kegemaran membaca dan literasi		1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	-	-	-	-	1 Dokumen	300.000.000	DPKP NTB	Nusa Tenggara Barat

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		2027		2028		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		2.23.02.1.01.0015	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah perpustakaan elektronik yang dikembangkan dan dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK		10 Perpustakaan	350.000.000	10 Perpustakaan	350.000.000	10 Perpustakaan	350.000.000					10 Perpustakaan	1.050.000.000	DPKP NTB	Nusa Tenggara Barat
		2.23.02.1.01.0016	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan		1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000					1 Dokumen	600.000.000	DPKP NTB	Nusa Tenggara Barat
		2.23.02.1.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah kegiatan Pengembangan Minat dan Budaya Baca		8 Kegiatan/ Lokus	3.150.000.000	8 Kegiatan/ Lokus	650.000.000	8 Kegiatan/ Lokus	650.000.000					8 Kegiatan/ Lokus	4.450.000.000	DPKP NTB	Nusa Tenggara Barat
		2.23.02.1.02.0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus		10 Lokus	100.000.000	10 Lokus	100.000.000	10 Lokus	100.000.000					10 Lokus	300.000.000	DPKP NTB	Nusa Tenggara Barat
		2.23.02.1.02.0002	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		1 Perpustakaan	2.500.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Perpustakaan	2.500.000.000	DPKP NTB	Nusa Tenggara Barat
		2.23.02.1.02.0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca		10 Orang	100.000.000	10 Orang	100.000.000	10 Orang	100.000.000	-	-	-	-	10 Orang	300.000.000	DPKP NTB	Nusa Tenggara Barat
		2.23.02.1.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan		10 Perpustakaan	300.000.000	10 Perpustakaan	300.000.000	10 Perpustakaan	300.000.000					10 Perpustakaan	900.000.000	DPKP NTB	Nusa Tenggara Barat
		2.23.02.1.02.0006	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Provinsi yang Dipilih dan Didukung Keaktifannya		2 Orang	150.000.000	2 Orang	150.000.000	2 Orang	150.000.000	-	-	-	-	2 Orang	450.000.000	DPKP NTB	Nusa Tenggara Barat
		2.23.03	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase Pelestarian KCKR dan Naskah Kuno Milik Daerah		100 %	197.000.000	100 %	197.000.000	100 %	197.000.000					100 %	591.000.000	DPKP NTB	Nusa Tenggara Barat
		2.23.03.1.01	Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi	Jumlah Pengelolaan Karya Cetak Karya Rekam		300 Eksemplar	95.000.000	300 Eksemplar	95.000.000	300 Eksemplar	95.000.000					300 Eksemplar	285.000.000	DPKP NTB	Nusa Tenggara Barat
		2.23.03.1.01.0001	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR		300 Eksemplar	25.000.000	300 Eksemplar	25.000.000	300 Eksemplar	25.000.000					300 Eksemplar	75.000.000	DPKP NTB	Nusa Tenggara Barat

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		2027		2028					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		2.23.03.1.01.0002	Pemberian Penghargaan Kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Jumlah Penerima Penghargaan Kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif Dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam		10 Penerbit	70.000.000	10 Penerbit	70.000.000	10 Penerbit	70.000.000					10 Penerbit	210.000.000	DPKP NTB	Nusa Tenggara Barat
		2.23.03.1.02	Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah	Jumlah Pengelolaan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi		500 Eksemplar	35.000.000	500 Eksemplar	35.000.000	500 Eksemplar	35.000.000					500 Eksemplar	105.000.000	DPKP NTB	Nusa Tenggara Barat
		2.23.03.1.02.0001	Penerbitan Katalog Induk Daerah	Jumlah Dokumen KID dan Literatur Sekunder Lainnya yang Diterbitkan		1.500 Entry	25.000.000	1.500 Entry	25.000.000	1.500 Entry	25.000.000					1.500 Entry	75.000.000	DPKP NTB	Nusa Tenggara Barat
		2.23.03.1.02.0002	Penerbitan Bibliografi Daerah	Jumlah Bibliografi Daerah yang Diterbitkan		10 Naskah	10.000.000	10 Naskah	10.000.000	10 Naskah	10.000.000					10 Naskah	30.000.000	DPKP NTB	Nusa Tenggara Barat
		2.23.03.1.03	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi	Jumlah Pengelolaan dan Pelestarian Naskah Kuno Daerah		10 Eksemplar	50.000.000	10 Eksemplar	50.000.000	10 Eksemplar	50.000.000					10 Eksemplar	150.000.000	DPKP NTB	Nusa Tenggara Barat
		2.23.03.1.03.0001	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Masyarakat yang Berperan dalam Pelestarian Naskah Kuno dan Pendaftaran Naskah Kuno		20 Orang	25.000.000	20 Orang	25.000.000	20 Orang	25.000.000					20 Orang	75.000.000	DPKP NTB	Nusa Tenggara Barat
		2.23.03.1.03.0002	Pengembangan Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki Oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang Dilakukan Pengembangan yang Dimiliki Oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan		10 Eksemplar	25.000.000	10 Eksemplar	25.000.000	10 Eksemplar	25.000.000					10 Eksemplar	75.000.000	DPKP NTB	Nusa Tenggara Barat
		2.23.03.1.04	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Daerah Provinsi yang Tersedia		400 Eksemplar	17.000.000	400 Eksemplar	17.000.000	400 Eksemplar	17.000.000					400 Eksemplar	51.000.000	DPKP NTB	Nusa Tenggara Barat
		2.23.03.1.04.0001	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diseleksi dan Dilakukan Pengadaan Oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi		200 Eksemplar	15.000.000	200 Eksemplar	15.000.000	200 Eksemplar	15.000.000					200 Eksemplar	45.000.000	DPKP NTB	Nusa Tenggara Barat

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
						2024		2025		2026		2027		2028		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
		2.23.03.1.04.0002	Pengolahan dan Penyangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diolah dan Dilakukan penyangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi		200 Eksemplar	2.000.000	200 Eksemplar	2.000.000	200 Eksemplar	2.000.000					200 Eksemplar	6.000.000	DPKP NTB	Nusa Tenggara Barat
Terwujudnya Tertib Arsip Dalam Penyelenggaraan Kearsipan pada Pemerintah Provinsi NTB				Persentase Perangkat Daerah dan LKD Kab/Kota dengan Nilai Pengawasan Kearsipan B Ke Atas														DPKP NTB	Nusa Tenggara Barat
	Meningkatnya Pengelolaan Arsip Perangkat Daerah yang Tertib			Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Tertib														DPKP NTB	Nusa Tenggara Barat
				Persentase Arsip yang Terselamatkan															
		2.24.02	Program Pengelolaan Arsip	Persentase Pengelolaan Arsip Dinamis dan Arsip Statis		100 %	2.024.985.600	100 %	2.024.985.600	100 %	2.024.985.600					100 %	6.074.956.800	DPKP NTB	Nusa Tenggara Barat
		2.24.02.1.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Jumlah Pengolahan Arsip Dinamis		10,000 Berkas	980.000.000	10,000 Berkas	980.000.000	10,000 Berkas	980.000.000					10.000 Berkas	2.940.000.000	DPKP NTB	Nusa Tenggara Barat
		2.24.02.1.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi		17 Laporan	100.000.000	17 Laporan	100.000.000	17 Laporan	100.000.000					17 Laporan	300.000.000	DPKP NTB	Nusa Tenggara Barat
		2.24.02.1.01.0004	Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah arsip dinamis yang telah disusutkan		10.000 Arsip	80.000.000	10.000 Arsip	80.000.000	10.000 Arsip	80.000.000					10.000 Arsip	240.000.000	DPKP NTB	Nusa Tenggara Barat
		2.24.02.1.01.0005	Pelaksanaan Alih Media Arsip Dinamis dan Autentikasi	Jumlah arsip yang di alih mediakan dan diautentikasi		500 Arsip	400.000.000	500 Arsip	400.000.000	500 Arsip	400.000.000					500 Arsip	1.200.000.000	DPKP NTB	Nusa Tenggara Barat
		2.24.02.1.01.0006	Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis	Jumlah daftar arsip dinamis		1 Arsip	400.000.000	1 Arsip	400.000.000	1 Arsip	400.000.000					1 Arsip	1.200.000.000	DPKP NTB	Nusa Tenggara Barat
		2.24.02.1.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	Jumlah Arsip Statis yang Terselamatkan dan Dilestarikan		5,000 Arsip	400.000.000	5,000 Arsip	400.000.000	5,000 Arsip	400.000.000					5,000 Arsip	1.200.000.000	DPKP NTB	Nusa Tenggara Barat
		2.24.02.1.02.0001	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang dikumpulkan dan Disampaikan Kepada ANRI		-	-	-	-	-	-					-	-	DPKP NTB	Nusa Tenggara Barat



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
						2024		2025		2026		2027		2028		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
		2.24.02.1.02.0003	Pengembangan Khazanah Arsip Statis Melalui Wawancara Sejarah Lisan	Jumlah orang yang diwawancarai		2 Orang	50.000.000	2 Orang	50.000.000	2 Orang	50.000.000				2 Orang	150.000.000	DPKP NTB	Nusa Tenggara Barat	
		2.24.02.1.02.0004	Pengembangan Khazanah Arsip Statis Melalui Penerbitan Naskah Sumber Arsip	Jumlah penerbitan naskah sumber arsip		-	-	-	-	-	-				-	-	DPKP NTB	Nusa Tenggara Barat	
		2.24.02.1.02.0005	Akuisisi Arsip Statis	Jumlah arsip statis yang dilakukan akuisisi		100 Arsip	350.000.000	100 Arsip	350.000.000	100 Arsip	350.000.000				100 Arsip	1.050.000.000	DPKP NTB	Nusa Tenggara Barat	
		2.24.02.1.03	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Jumlah Pengelolaan Sistem Informasi Kearsipan nasional		15 Laporan	644.985.600	15 Laporan	644.985.600	15 Laporan	644.985.600				15 Laporan	1.934.956.800	DPKP NTB	Nusa Tenggara Barat	
		2.24.02.1.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Prov Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN		500 Pengguna	370.000.000	500 Pengguna	370.000.000	500 Pengguna	370.000.000				500 Pengguna	1.110.000.000	DPKP NTB	Nusa Tenggara Barat	
		2.24.02.1.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi		15 Laporan	274,985,600	15 Laporan	274,985,600	15 Laporan	274,985,600				15 Laporan	824.956.800	DPKP NTB	Nusa Tenggara Barat	
		2.24.03	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase Arsip yang Terselamatkan		100 %	50.000.000	100 %	50.000.000	100 %	50.000.000				100 %	150.000.000	DPKP NTB	Nusa Tenggara Barat	
		2.24.03.1.01	Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Di Nilai		10,000 Arsip	50.000.000	10,000 Arsip	50.000.000	10,000 Arsip	50.000.000				10,000 Arsip	150.000.000	DPKP NTB	Nusa Tenggara Barat	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		2027		2028		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		2.24.03.1.01.0001	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun		10,000 Arsip	50.000.000	10,000 Arsip	50.000.000	10,000 Arsip	50.000.000					10,000 Arsip	150.000.000	DPKP NTB	Nusa Tenggara Barat
		2.24.03.1.01.0002	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPKP NTB	Nusa Tenggara Barat
		2.24.03.1.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Provinsi	Jumlah Arsip Daerah Provinsi yang Terselamatkan Akibat Bencana		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPKP NTB	Nusa Tenggara Barat
		2.24.03.1.02.0001	Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPKP NTB	Nusa Tenggara Barat
		2.24.03.1.02.0002	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPKP NTB	Nusa Tenggara Barat
		2.24.03.1.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip Daerah Provinsi yang digabung dan dibubarkan dan pemekaran daerah Kab/Kota		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPKP NTB	Nusa Tenggara Barat
		2.24.03.1.03.0001	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPKP NTB	Nusa Tenggara Barat
		2.24.03.1.03.0002	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah Arsip Daerah yang di nilai		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPKP NTB	Nusa Tenggara Barat
		2.24.03.1.03.0003	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi pemekaran Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip yang Terselamatkan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPKP NTB	Nusa Tenggara Barat

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		2027		2028		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		2.24.03.1.04	Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi	Jumlah Arsip Digital yang dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPKP NTB	Nusa Tenggara Barat	
		2.24.03.1.04.0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Arsip yang dinilai dan ditetapkan keabsahannya		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPKP NTB	Nusa Tenggara Barat	
		2.24.03.1.04.0002	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Arsip Digital yang memiliki Keabsahan Arsip		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPKP NTB	Nusa Tenggara Barat	
		2.24.03.1.05	Pencarian Arsip Statis Provinsi yang dinyatakan Hilang	Jumlah Arsip Statis yang Dilestarikan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPKP NTB	Nusa Tenggara Barat	
		2.24.03.1.05.01	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Arsip Statis yang Dinilai		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPKP NTB	Nusa Tenggara Barat	
		2.24.03.1.05.02	Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Arsip Digital yang dinilai		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPKP NTB	Nusa Tenggara Barat	
		2.24.03.1.05.03	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Jumlah Arsip yang terdata		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPKP NTB	Nusa Tenggara Barat	

## **6.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Program Unggulan Literasi Digital Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024-2026**

Program pembangunan daerah adalah program prioritas yang akan dilaksanakan selama satu periode yang diarahkan untuk mengatasi berbagai masalah dan isu strategis yang dihadapi dan memenuhi berbagai kebutuhan yang dirasakan dan lebih mendayagunakan pemanfaatan potensi daerah. Program pembangunan daerah merupakan pernyataan yang merupakan program kepala daerah Provinsi NTB yang berisi program prioritas yang bersifat strategis.

Target kinerja Sasaran Program yang telah ditetapkan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB merupakan kondisi yang akan dicapai dan diharapkan dalam mendukung keberhasilan target kinerja sasaran strategis yang membawa pengaruh atau dampak (*outcome/impact*) dalam mewujudkan pembangunan literasi masyarakat dan kegemaran membaca masyarakat di Provinsi NTB.

Program perpustakaan literasi dan pengelolaan arsip secara tertib merupakan langkah strategi dalam mewujudkan masyarakat berpengetahuan ditandai dengan meningkatnya indeks literasi masyarakat dan pengelolaan arsip secara tertib pada perangkat daerah. Dimensi pembangunan bidang perpustakaan dan kearsipan provinsi NTB dibangun dalam dua dimensi sasaran yaitu 1) Meningkatnya Pemanfaatan Perpustakaan; dan 2) Meningkatnya Pengelolaan Arsip Perangkat Daerah yang Tertib. Melalui pengembangan, pembinaan perpustakaan, pembudayaan kegemaran dan pengelolaan arsip secara tertib yang integrative, komprehensif, tematik, dan spasial diharapkan akan terwujud pembangunan kualitas sumber daya manusia serta perwujudan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan sehingga terbentuk masyarakat yang berpengetahuan, inovatif, kreatif, dan berkarakter.

Berdasarkan hal tersebut, target yang ingin dicapai di tahun 2023 adalah Meningkatnya Angka Kunjungan Pemustaka dan Meningkatnya Pengelolaan Arsip Perangkat Daerah yang Tertib melalui pemanfaatan dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam hal kemudahan bagi pemustaka dalam mengakses

informasi yang dibutuhkan melalui aplikasi yang tersedia di pelayanan perpustakaan dan kearsipan (iDeposit, NTBelib, Inlislite, Srikandi dan JIKN).

Selanjutnya program utama pendukung program unggulan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB Tahun 2024-2026, sebagai berikut:

**Tabel. 6.2.1**  
**Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Program Unggulan**  
**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024-2026**

Program Unggulan	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	Terwujudnya pembangunan literasi masyarakat				Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat										DPKP NTB	Nusa Tenggara Barat
		Meningkatnya Pemanfaatan Perpustakaan			Angka Kunjungan Pemustaka										DPKP NTB	Nusa Tenggara Barat
					Persentase Jangkauan Layanan Perpustakaan Mobile ke Desa											
			2.23.02	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan		100%	6.950.000.000	100%	4.472.500.000	100 %	4.496.125.000	100 %	15.918.625.000	DPKP NTB	Nusa Tenggara Barat
			2.23.02.1.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan		60 Perpustakaan	3.800.000.000	63 Perpustakaan	3.822.500.000	65 Perpustakaan	3.846.125.000	188 Perpustakaan	11.468.625.000	DPKP NTB	Nusa Tenggara Barat
			2.23.02.1.01.0015	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah perpustakaan elektronik yang dikembangkan dan dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK		10 Perpustakaan	350.000.000	10 Perpustakaan	350.000.000	10 Perpustakaan	350.000.000	10 Perpustakaan	1.050.000.000	DPKP NTB	Nusa Tenggara Barat
			2.23.02.1.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah kegiatan Pengembangan Minat dan Budaya Baca		8 Kegiatan/Lokus	3.150.000.000	8 Kegiatan/Lokus	650.000.000	8 Kegiatan/Lokus	650.000.000	8 Kegiatan/Lokus	4.450.000.000	DPKP NTB	Nusa Tenggara Barat
			2.23.02.1.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan		10 Perpustakaan	300.000.000	10 Perpustakaan	300.000.000	10 Perpustakaan	300.000.000	10 Perpustakaan	900.000.000	DPKP NTB	Nusa Tenggara Barat
			2.23.03	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase Pelestarian KCKR dan Naskah Kuno Milik Daerah		100 %	197.000.000	100 %	197.000.000	100 %	197.000.000	100 %	591.000.000	DPKP NTB	Nusa Tenggara Barat
			2.23.03.1.01	Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi	Jumlah Pengelolaan Karya Cetak Karya Rekam		300 Eksemplar	95.000.000	300 Eksemplar	95.000.000	300 Eksemplar	95.000.000	300 Eksemplar	285.000.000	DPKP NTB	Nusa Tenggara Barat
			2.23.03.1.01.0001	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Jumlah Pengelolaan Koleksi Deposit yang Tersedia		300 Eksemplar	25.000.000	300 Eksemplar	25.000.000	300 Eksemplar	25.000.000	300 Eksemplar	75.000.000	DPKP NTB	Nusa Tenggara Barat

Program Unggulan	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			2.23.03.1.02	Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah	Jumlah Pengelolaan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi		500 Eksemplar	35.000.000	500 Eksemplar	35.000.000	500 Eksemplar	35.000.000	500 Eksemplar	105.000.000	DPKP NTB	Nusa Tenggara Barat
			2.23.03.1.02.0001	Penerbitan Katalog Induk Daerah	Jumlah Katalog Induk Daerah yang dilayankan		1.500 Entry	25.000.000	1.500 Entry	25.000.000	1.500 Entry	25.000.000	1.500 Entry	75.000.000	DPKP NTB	Nusa Tenggara Barat
			2.23.03.1.02.0002	Penerbitan Bibliografi Daerah	Jumlah Bibliografi Daerah yang tersedia di deposit		10 Naskah	10.000.000	10 Naskah	10.000.000	10 Naskah	10.000.000	10 Naskah	30.000.000	DPKP NTB	Nusa Tenggara Barat
			2.23.03.1.03	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi	Jumlah Pengelolaan dan Pelestarian Naskah Kuno Daerah		10 Eksemplar	50.000.000	10 Eksemplar	50.000.000	10 Eksemplar	50.000.000	10 Eksemplar	150.000.000	DPKP NTB	Nusa Tenggara Barat
			2.23.03.1.03.0002	Pengembangan Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki Oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	Jumlah Naskah Kunah yang Dilakukan Pengembangan yang Dimiliki Oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan		10 Eksemplar	25.000.000	10 Eksemplar	25.000.000	10 Eksemplar	25.000.000	10 Eksemplar	75.000.000	DPKP NTB	Nusa Tenggara Barat
	Terwujudnya Tertib Arsip Dalam Penyelenggaraan Kearsipan pada Pemerintah Provinsi NTB				Persentase Perangkat Daerah dan LKD Kab/Kota dengan Nilai Pengawasan Kearsipan B Ke Atas										DPKP NTB	Nusa Tenggara Barat
		Meningkatnya Pengelolaan Arsip Perangkat Daerah yang Tertib			Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Tertib										DPKP NTB	Nusa Tenggara Barat
					Persentase Arsip yang Terselamatkan											
			2.24.02	Program Pengelolaan Arsip	Persentase Pengelolaan Arsip Dinamis dan Arsip Statis		100 %	2.024.985.600	100 %	2.024.985.600	100 %	2.024.985.600	100 %	6.074.956.800	DPKP NTB	Nusa Tenggara Barat
			2.24.02.1.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Jumlah Pengolahan Arsip Dinamis		10,000 Berkas	980.000.000	10,000 Berkas	980.000.000	10,000 Berkas	980.000.000	10.000 Berkas	2.940.000.000	DPKP NTB	Nusa Tenggara Barat
			2.24.02.1.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi		17 Laporan	100.000.000	17 Laporan	100.000.000	17 Laporan	100.000.000	17 Laporan	300.000.000	DPKP NTB	Nusa Tenggara Barat
			2.24.02.1.01.0005	Pelaksanaan Alih Media Arsip Dinamis dan Autentikasi	Jumlah Arsip yang di alih mediakan dan diautentikasi		500 Arsip	400.000.000	500 Arsip	400.000.000	500 Arsip	400.000.000	500 Arsip	1.200.000.000	DPKP NTB	Nusa Tenggara Barat

Program Unggulan	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung g jawab	Lokasi
							2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			2.24.02.1.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	Jumlah Arsip Statis yang Terselamatkan dan Dilestarikan		5,000 Arsip	400.000.000	5,000 Arsip	400.000.000	5,000 Arsip	400.000.000	5,000 Arsip	1.200.000.000	DPKP NTB	Nusa Tenggara Barat
			2.24.02.1.02.0005	Akuisisi Arsip Statis	Jumlah arsip statis yang dilakukan akuisisi		100 Arsip	350.000.000	100 Arsip	350.000.000	100 Arsip	350.000.000	100 Arsip	1.050.000.000	DPKP NTB	Nusa Tenggara Barat
			2.24.02.1.03	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Jumlah Pengelolaan Sistem Informasi Kearsipan nasional		15 Laporan	644.985.600	15 Laporan	644.985.600	15 Laporan	644.985.600	15 Laporan	1.934.956.800	DPKP NTB	Nusa Tenggara Barat
			2.24.02.1.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Prov Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN		500 Pengguna	370.000.000	500 Pengguna	370.000.000	500 Pengguna	370.000.000	500 Pengguna	1.110.000.000	DPKP NTB	Nusa Tenggara Barat
			2.24.03	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase Arsip yang Terselamatkan		100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	150.000.000	DPKP NTB	Nusa Tenggara Barat
			2.24.03.1.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang di Nilai		10.000 Arsip	50.000.000	10.000 Arsip	50.000.000	10.000 Arsip	50.000.000	10.000 Arsip	150.000.000	DPKP NTB	Nusa Tenggara Barat
			2.24.03.1.01.0001	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun		10.000 Arsip	50.000.000	10.000 Arsip	50.000.000	10.000 Arsip	50.000.000	10.000 Arsip	150.000.000	DPKP NTB	Nusa Tenggara Barat



## **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan, yang dikelompokkan kedalam masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*) dan dampak (*impacts*) yang secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran.

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah Nusa Tenggara Barat dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026.

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian pada akhir periode Renstra. Keberhasilan tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator sasaran pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka indikator kinerja daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang mengacu pada Definisi dan Teknik Pengukuran Indikator Kinerja Utama, berikut Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB, sebagaimana dalam tabel 7.1.1.

**Tabel 7.1.1 Indikator Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB**

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Kinerja Sasaran						Kondisi Kerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2024		2025		2026			
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	68,5	-	69	-	70	-	-	<b>Formulasi:</b> Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang dirilis oleh Perpustakaan Nasional RI setiap tahun
2.	Persentase Jangkauan Layanan Perpustakaan Mobile ke Desa	%	20	-	25	-	30	-	-	<b>Formulasi:</b> Jumlah desa/ kelurahan yang dikunjungi perpustakaan keliling setiap tahun dibagi jumlah seluruh desa/ kelurahan di provinsi NTB x 100%
3.	Persentase Arsip yang Terselamatkan	%	100	-	100	-	100	-	-	<b>Formulasi:</b> $\frac{\Sigma \text{ arsip yang terselamatkan}}{\Sigma \text{ arsip yang ada}} \times 100\%$

## BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024-2026 yang telah disusun melalui suatu alur atau proses yang baku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta melalui pemikiran dan diskusi yang mendalam tentang rumusan perencanaan yang strategis bagi kegiatan perpustakaan dan kearsipan selama kurun waktu 3 (tiga) tahun kedepan, seharusnya dapat dijadikan tolok ukur atau acuan dalam rangka menghasilkan keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*) dan manfaat (*benefit*) yang sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan.

Oleh karena itu, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024-2026 diharapkan dapat dilaksanakan atau terwujud sebagaimana mestinya dan konkritnya dapat menggambarkan penampilan perencanaan (*performance planning*) yang mudah dijabarkan kedalam Rencana Kerja Tahunan (Renja) maupun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA).

Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB merupakan dokumen perencanaan dan program tahun 2024-2026 yang disusun sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, dengan menyesuaikan dinamika perubahan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan isu strategis terkini.

Upaya dalam mewujudkan pencapaian Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi NTB Tahun 2024-2026 dilakukan dengan perumusan tujuan jangka menengah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB, yaitu 1) Terwujudnya pembangunan literasi masyarakat dengan Indikator tujuan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat; 2) Terwujudnya Tertib Arsip dalam Penyelenggaraan Kearsipan pada Pemerintah Provinsi NTB dengan indikator tujuan Persentase Perangkat Daerah dan LKD Kab/Kota dengan Nilai Pengawasan Kearsipan B Ke Atas, dengan 2 sasaran yaitu 1) Meningkatnya Pemanfaatan Perpustakaan dengan indikator sasaran Angka Kunjungan Pemustaka; 2) Meningkatnya Pengelolaan Arsip Perangkat Daerah yang Tertib dengan indikator sasaran Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Tertib.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Awal Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembangaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia dan sumber pendanaannya serta komitmen semua unsur pimpinan maupun staf. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan rencana strategis ini setiap tahun akan dilaksanakan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan atau revisi muatan Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan pada rencana strategis ini.